AUDITED TA 2022

LAPORAN KEUANGAN

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

(021) 34833061

baketrans@kemenhub.go.id

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2023
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2023
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

No.	Nama	Tanggal	Paraf
1	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	04-05-2023	
2	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	04-05-2023	
3	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	04-05-2023	
4	Plt. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	04-05-2023	
5	Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	04-05-2023	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iv
Pernyataan Tanggung Jawab		v
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	49
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	64
VI.	Lampiran dan Daftar	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5 | Telp. : (021) 34833061, 34833065 | Email : baketrans@kemenhub.go.id
Jakarta 10110 | Fax. : (021) 34833061, 34833065 | Web-site : https://baketrans.dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2023
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 34833061, 34833065 Fax. : (021) 34833061, 34833065 | Email : baketrans@kemenhub.go.id Web-site : https://baketrans.dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2023
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

No.	Nama	Tanggal	Paraf
1	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	04-05-2023	
2	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	04-05-2023	
3	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	04-05-2023	
4	Plt. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	04-05-2023	
5	Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	04-05-2023	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.315.960.717,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.97.096.874.442,- atau mencapai 99,79% dari alokasi anggaran sebesar Rp.97.299.623.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Nilai Aset yang dicatat dan disajikan sebesar Rp.72.263.415.391,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.10.675.131,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.71.575.877.564,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.676.862.696,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.150.332.000,- dan Rp.72.113.083.391,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar sampai dengan periode per 31 Desember 2022. Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.102.393.469.501,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.315.960.717,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.97.096.874.442,- atau mencapai 99,79% dari alokasi anggaran sebesar Rp.97.299.623.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Nilai Aset yang dicatat dan disajikan sebesar Rp.72.263.415.391,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.10.675.131,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.71.575.877.564,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.676.862.696,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.150.332.000,- dan Rp.72.113.083.391,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar sampai dengan periode per 31 Desember 2022. Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.102.393.469.501,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp. (102.393.469.501),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.1.135.343.995,- dan Rp. (101.258.125.506),- . Pos Luar Biasa sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (101.258.125.506),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp.77.605.138.689,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (101.258.125.506),- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(14.843.517),- dan transaksi antar entitas senilai Rp.95.780.913.725,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 72.113.083.391,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk *Audited* Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.315.960.717	0,00	1.341.922.174
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.315.960.717	0,00	1.341.922.174
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	30.945.758.000	30.944.134.813	99,99	31.226.146.586
Belanja Barang	B.4	63.782.782.000	63.583.402.841	99,69	101.673.266.161
Belanja Modal	B.5	2.571.083.000	2.569.336.788	99,93	6.678.726.191
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		97.299.623.000	97.096.874.442	99,79	139.578.138.938

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)			
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pend	C.7	-	-
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	10.675.131	21.219.400
Persediaan Belum Diregister			-
Jumlah Aset Lancar		10.675.131	21.219.400
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Tanah Belum Diregister		-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	59.425.783.061	65.826.805.591
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	47.890.137.643	46.605.855.025
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	13.687.694.174	13.687.694.174
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.522.153.447	3.522.153.447
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(52.949.890.761)	(52.974.785.528)
Jumlah Aset Tetap		71.575.877.564	76.667.722.709
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	2.361.619.000	2.263.384.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
Aset Lain-Lain	C.22	479.648.500	4.489.769.330
Aset Lainnya Belum Diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(2.164.404.804)	(5.775.042.750)
Jumlah Aset Lainnya		676.862.696	978.110.580
JUMLAH ASET		**72.263.415.391**	**77.667.052.689**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	150.332.000	61.914.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		150.332.000	61.914.000
JUMLAH KEWAJIBAN		**150.332.000**	**61.914.000**
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	72.113.083.391	77.605.138.689
JUMLAH EKUITAS		72.113.083.391	77.605.138.689
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**72.263.415.391**	**77.667.052.689**

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 Desemeber 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		536.479.368
JUMLAH PENDAPATAN		-	**536.479.368**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	31.032.552.813	31.241.521.586
Beban Persediaan	D.3	1.913.687.188	2.842.140.560
Beban Barang dan Jasa	D.4	33.185.291.784	66.435.416.629
Beban Pemeliharaan	D.5	4.628.711.168	3.613.945.613
Beban Perjalanan Dinas	D.6	23.866.256.970	28.802.759.104
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	7.766.969.578	7.587.692.101
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**102.393.469.501**	**140.523.475.593**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(102.393.469.501)	(139.986.996.225)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		**150.373.753**	**543.711.493**
Pendapatan pelepasan aset Non Lancar		333.609.003	617.977.993
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		183.235.250	74.266.500
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**984.970.242**	**187.464.813**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		984.970.242	187.464.813
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.135.343.995	731.176.306
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(101.258.125.506)**	**(139.255.819.919)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(101.258.125.506)**	**(139.255.819.919)**

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	77.605.138.689	71.253.603.288
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	101.258.125.506	(139.255.819.919)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(14.843.517)	(60.876.271)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON RE	E.3.6	(12.224.989)	(60.876.271)
JUMLAH		**(2.618.528)**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	95.780.913.725	145.668.231.591
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.492.055.298)	6.351.535.401
EKUITAS AKHIR	E.5	**72.113.083.391**	**77.605.138.689**

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.
NIP 196307171989031002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Transportasi

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Badan Kebijakan Transportasi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya transportasi yang handal melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, Jakarta.

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi, dan melakukan kerjasama dengan lembaga iptek. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas penelitian, pengembangan dan teknologi menjadi landasan perumusan kebijakan strategis transportasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Kebijakan Transportasi berkomitmen dengan visi *"**Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah".*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- Melakukan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi.
- Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- Melaksanakan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Kebijakan Transportasi yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Kebijakan Transportasi adalah 5 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAKPA

No	Kode Satker	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	288752	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1				1
2	288944	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1				1
3	288951	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1				1
4	414267	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	1				1
5	634171	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1				1
Jumlah			5				5

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Kebijakan Transportasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Deputi Administrasi BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berke mbang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, berdasarkan DIPA induk TA 2022 Badan Kebijakan Transportasi No. DIPA/022.11-0/2022 Tanggal 17 November 2021 Pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

Uraian	2022		
	PAGU AWAL	PAGU REVISI	TAMBAH/ KURANG
Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Belanja			
Belanja Pegawai	38.158.669.000	30.945.758.000	7.212.911.000
Belanja Barang	130.380.388.000	63.782.782.000	66.597.606.000
Belanja Modal	5.763.268.000	2.571.083.000	3.192.185.000
Jumlah Belanja	**174.302.325.000**	**97.299.623.000**	**77.002.702.000**

Uraian	2022		
	PAGU AWAL	REALISASI	SISA PAGU
Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Belanja			
Belanja Pegawai	30.945.758.000	30.944.134.813	1.623.187
Belanja Barang	63.782.782.000	63.583.402.841	199.379.159
Belanja Modal	2.571.083.000	2.569.336.788	1.746.212
Jumlah Belanja	**97.299.623.000**	**97.096.874.442**	**202.748.558**

Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan 2 (Dua) kali revisi terhadap DIPA Badan Kebijakan Transportasi dengan uraian sebagai berikut:

- Revisi DIPA Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Nomor S-438/AG/AG.3/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal usulan revisi pagu anggaran berubah dan pergeseran anggaran antar Bagian Anggaran dan/atau antar Kementerian/Lembaga dari Badan Kebijakan Transportasi ke BRIN dengan uraian sebagai berikut:

Satker	Pagu Blokir (Rp)	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang Operasional (Rp)	TOTAL (Rp)
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-	3.004.295.161		Rp 3.004.295.161
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	13.828.341.000	-	6.080.000	Rp 13.834.421.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	16.022.471.000	-		Rp 16.022.471.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	20.800.570.000	-	10.640.000	Rp 20.811.210.000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	13.538.397.000	-	6.080.000	Rp 13.544.477.000
Jumlah	**64.189.779.000**	**3.004.295.161**	**22.800.000**	**Rp 67.216.874.161**
PEMBULATAN				**Rp 67.216.875.000**

- Menunjuk Surat Menteri Keuangan nomor: S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Badan Kebijakan Transportasi menyampaikan usulan pengalihan Anggaran Blokir Automatic Adjustment melalui surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi nomor: KU.002/01/08/BKT/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.9.785.827.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah. Dan telah dilakukan pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Satker	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Moda (Rp)	TOTAL (Rp)
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	3.678.771.000	765.368.000	-	Rp 4.444.139.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-	504.219.000	-	Rp 504.219.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-	533.570.000	-	Rp 533.570.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	-	630.000.000	3.192.185.000	Rp 3.822.185.000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-	481.714.000	-	Rp 481.714.000
Jumlah	**3.678.771.000**	**2.914.871.000**	**3.192.185.000**	**Rp 9.785.827.000**

Realisasi Pendapatan Rp. 1.315.960.717

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.315.960.717,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan lingkup Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	333.609.003	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	2.618.528	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	4.080.147	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		975.653.039	
Jumlah	**-**	**1.315.960.717**	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak				
Uraian	**NTPN**	**Tanggal Bayar**	**Pihak Ketiga**	**Jumlah**
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi				
Pendapatan Penjualan Perlatan dan Mesin	FF2D56U8EBN1C801	17/03/2022		37.777.777
Pendapatan Penjualan Perlatan dan Mesin	89DC61JNFCT5A379	3/10/2022		30.781.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL				4.080.147
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji				2.618.528
Pusat Kebijakan Keselematan dan Keamanan Transportasi				
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	A2EBE1JNFCEI3EKH	13/5/2022		48.000.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	73D3B8NN3E122GFD	27/5/2022		99.670.800
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0B35F2G4V71F7185	30/5/2022		185.000.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	091D11JNFD3Q912J	26/12/2022		12.385.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan				
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	ADEB33CIF1MHJT2H	21/06/2022		22.612.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	03B1B8N3E0LE25CF	1/6/2022		110
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	80BFF7QLU631L6J6	1/6/2022		200.937
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2B5260N9VHFUD79E	1/6/2022		25.905.125
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	B58B60N9VHFUD7LU	1/6/2022		35.721.270
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1191C0N9VHFUD7VK	1/6/2022		90.268.302
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4BF4961QUGU8R87K	1/6/2022		313.652
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	DA6013CIF173K8AB	1/6/2022		198.122.378
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1C78855DEMO7N54F	5/22/2022	ITB	78.760.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	ADEB33CIF1MHJT2H	21/06/2022		12.222.229
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi				
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	ECA4A0N9VHS4FH7C	13/05/2022		87.166.145
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	DB26C48VUS5M628K	13/005/2022		2.040.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	AB2C76UBEC2L4RHL	7/7/2022		206.125.997
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1CF448N3E1712751	11/7/2022		784.320
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4CB0048VUSBNE0CI	19/07/2022		10.000.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	9D4927QLU6L9203A	15/07/2022		10.000.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	35BF62G4V7LVD4HK	22/12/2022		10.000.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	113D161QUHVJ7CF6	22/12/2022		10.000.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda				
Pendapatan dari Pemindahan tangan BMN lainnya	488317QLU6NRLC7A	1/8/2022		11.705.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	00D516U8EBT0GMUF	5/18/2022		83.700.000

Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

  Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.75.257.452 merupakan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.37.777.777, Penjualan Lift sebesar Rp.30.781.000, Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp.4.080.147, dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp.2.618.528

- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

  Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 129.990.465 merupakan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2019 PT. Mitraplan Kons dan PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult dengan total pengembalian sebesar Rp. 1.686.072.394 serta pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dalam hal ini pelepasan aset berupa kendaraan 1 Unit minibus Toyota Kijang Innova G sebesar Rp.78.999.999, 1 Unit minibus Toyota Kijang Innova E sebesar Rp.81.999.999 dan 1 Unit minibus Nissan Xtrail 2.0 MT sebesar Rp.45.125.999 dengan total Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.336.116.462.

- Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

  Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.95.405.000 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.11.705.000 berupa penjualan dari meja, kursi, laptop, dll. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp. 83.700.000

- Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan

  Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.464.126.003 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.34.834.229 secara lelang dan

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp.429.291.774

- Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

  Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.345.055.800 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.11.705.000 dan Penerimaan terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar yang merupakan hasil dari penjualan meja, kursi, sekat ruangan, dan lain sebagainya yang merupakan sisa proses pembongkaran renovasi ruangan sebesar Rp. 12.385.000 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.332.670.800.

Rincian realisasi pendapatan per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Sekretariat Badan Kebijakan Transportas	75.257.452	900.609.417	(91,64)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	336.116.462	132.608.368	153,47
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	95.405.000	95.168.168	0,25
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	464.126.003	182.896.604	153,76
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	345.055.800	30.639.617	1.026,18
Jumlah	**1.315.960.717**	**1.341.922.174**	**(1,93)**

Realisasi Belanja Rp.97.096.874.442

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.97.096.874.442,- atau 99,79% dari anggaran belanja sebesar Rp.97.299.623.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN	2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	30.945.758.000	30.944.134.813	99,99
Belanja Barang	63.782.782.000	63.583.402.841	99,69
Belanja Modal	2.571.083.000	2.569.336.788	99,93
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	**97.299.623.000**	**97.096.874.442**	**99,79**
Total Belanja	**97.299.623.000**	**97.096.874.442**	**99,79**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

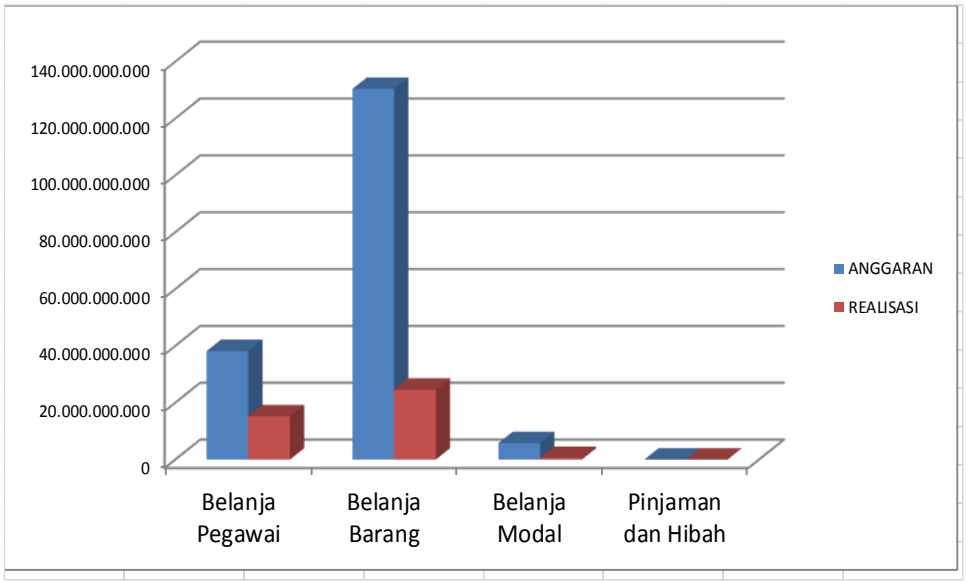

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2022

KEGIATAN	2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	65.421.497.000	65.418.121.179	99,99
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	8.056.823.000	8.028.773.168	99,65
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	7.143.056.000	7.119.120.494	99,66
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	9.352.995.000	9.302.710.721	99,46
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7.325.252.000	7.228.148.880	98,67
Total Belanja	**97.299.623.000**	**97.096.874.442**	**99,79**

Belanja Pegawai
Rp. 30.944.134.813

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.30.944.134.813,- dan Rp.31.226.146.586,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang

berkaitan dengan pembentukan modal. Pada TA 2022 dilakukan Pemindahan Pagu Anggaran Belanja Pegawai Pusat Kebijakan Transportasi di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Pada Pagu Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor: SKBLT 110 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021.

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kebijakan Transportasi merupakan Pembayaran gaji untuk 232 Pegawai dengan rincian sebagai berikut

Range Gaji Pegawai Badan Kebijakan Transportasi TA 2021

Golongan	**Jumlah Pegawai**	**Range Gaji**
II	21	2.022.200 - 3.820.000
III	163	2.579.400 - 4.797.000
IV	32	3.044.300 - 5.901.200

Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan

NO	URAIAN KELAS JABATAN	JUMLAH PENERIMA	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	1. JUMLAH TUNJANGAN 2. PAJAK 3. JUMLAH
1	17	1	33.240.000	33.240.000 6.722.259 39.962.259
2	15	5	19.280.000	96.400.000 14.666.738 111.066.738
3	13	3	10.936.000	32.808.000 4.921.200 37.729.200
4	12	12	9.896.000	118.752.000 13.209.642 131.961.642
5	11	15	8.757.600	131.364.000 17.380.615 148.744.615
6	09	47	5.079.200	238.722.400 12.970.083 251.692.483
7	08	19	4.595.150	87.307.850 3.572.118 90.879.968
8	07	114	3.915.950	394.727.760 6.836.958 401.564.718
9	06	15	3.510.400	49.145.600 501.572 49.647.172
10	05	1	3.134.250	3.134.250 84.820 3.219.070

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	14.992.831.685	15.873.850.045	(5,55)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	
Belanja Honorarium	0	0	
Belanja Lembur	-	5.097.000	(100,00)
Belanja Tunj.Khusus	15.951.303.128	15.351.808.649	3,91
Jumlah Belanja Kotor	**30.944.134.813**	**31.230.755.694**	**(0,92)**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(4.609.108)	(100,00)
Jumlah Belanja	**30.944.134.813**	**31.226.146.586**	**(0,90)**

Belanja Barang Rp.63.583.402.841,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.583.402.841,- dan Rp.101.673.266.161,-.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15.064.319.745	9.361.518.639	60,92
Belanja Barang Non Operasional	6.668.757.113	27.667.262.784	(75,90)
Belanja Persediaan	1.903.142.919	2.821.144.815	(32,54)
Belanja Jasa	11.452.214.926	29.545.281.762	(61,24)
Belanja Pemeliharaan	4.628.711.168	3.613.945.613	28,08
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.682.763.810	28.808.989.104	(17,79)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	183.493.160	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**63.583.402.841**	**101.818.142.717**	**(37,55)**
Pengembalian Belanja	-	(144.876.556)	
Jumlah Belanja	**63.583.402.841**	**101.673.266.161**	**(37,46)**

Jika dilihat dari total realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 37,46% dibanding Tahun 2021 dikarenakan adanya blokir anggaran sesuai DIPA induk TA 2022 Badan Kebijakan Transportasi No. DIPA/022.11-0/2022 Tanggal 17 November 2021 terdapat Pencantuman Blokir sebesar Rp. 94.882.583.000 Pada halaman IV.A di 4 (empat) Satuan Kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Dan juga blokir Anggaran *Automatic Adjustment* Tahap I dan II.

Rincian Belanja Barang Dalam rangka Penanganan Pendemi COVID-19 (menggunakan akun khusus COVID-19)

Akun	Jenis Belanja	2022	
		Anggaran	Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pendemi Covid-19	2.584.733.000	2.562.879.891
521241	Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pendemi Covid-19	26.319.000	25.575.000
522192	Belanja Jasa Penanganan Pendemi Covid-19	580.221.000	580.221.000
Jumlah		**3.191.273.000**	**3.168.675.891**

Rincian realisasi belanja barang per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi pada 31 Desember 2022 sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2022	REALISASI T.A. 2022	%
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	31.929.656.000	31.927.909.578	0,01
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	8.056.823.000	8.028.773.168	0,35
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	7.143.056.000	7.119.120.494	0,34
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	9.352.995.000	9.302.710.721	0,54
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7.325.252.000	7.228.148.880	1,34
Jumlah	**63.807.782.000**	**63.606.662.841**	**0,32**

Belanja Modal

Rp. 2.569.336.788

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.2.569.336.788,- dan Rp.6.678.726.191,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.164.149.170	4.362.071.968	(73,31)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan		48.994.000	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.306.952.618	2.072.091.223	0,00
Belanja Modal Lainnya	98.235.000	195.569.000	(49,77)
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**2.569.336.788**	**6.434.163.191**	**(60,07)**
Pengembalian	-	0	-
Jumlah Belanja	**2.569.336.788**	**6.678.726.191**	**(61,53)**

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 61,53% dibandingkan TA 2021, hal ini disebabkan adanya penurunan Pagu Anggaran dari Tahun Anggaran 2022.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,. Badan Kebijakan Transportasi sampai saat ini tidak memiliki asset tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.164.149.170

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.164.149.170,- mengalami penurunan sebesar 73,61% bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp.4.411.065.968. Hal ini disebabkan oleh penurunan pagu anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.164.149.170	4.362.071.968	(73,31)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan		48.994.000	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**1.164.149.170**	**4.411.065.968**	**(73,61)**
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**1.164.149.170**	**4.411.065.968**	**(73,61)**

realisasi belanja modal peralatan dan mesin per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi terdapat pada satuan kerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Belanja Modal Gedung Bangunan Rp. 1.306.952.618.-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.306.952.618,- dan sebesar Rp.2.072.091.223,.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2022	T.A 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	1.306.952.618	2.072.091.223	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**1.306.952.618**	**2.072.091.223**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**1.306.952.618**	**2.072.091.223**	**0,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, & Jaringan Rp.0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2022	T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal			0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Lainnya Rp. 98.235.000,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.98.235.000,- dan Rp.195.569.000,-. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 49,77% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan adanya penurunan pagu anggaran dari Tahun Anggaran 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2022	T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja *Software*	98.235.000	195.569.000	(49,77)
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**98.235.000**	**195.569.000**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**98.235.000**	**195.569.000**	**(49,77)**

No.	Uraian	Nilai Perolehan
1	Aplikasi *E-Survey*	98.235.000
	Jumlah	98.235.000

Rincian realisasi belanja modal lainnya per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	98.235.000	195.569.000	0,00
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-	-	0,00
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-	-	0,00
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	-	-	0,00
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-	-	0,00
Jumlah	**98.235.000**	**195.569.000**	**199,08**

Belanja modal lainnya berupa Pengadaan Aplikasi *E-Survey* pada satker Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2022	T.A. 2021	Naik (Turun)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2022 dan TA 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	
Jumlah	**-**	**-**

Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2022 dan TA 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas

TA 2022 Dan TA 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	**-**

Piutang PNBP Rp. 0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2022 dan 2021

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp. 0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR

TA 2022 dan 2021

No	Nama	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		**-**	**-**

BagianLancar TPA Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar

TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Uang Muka Belanja Rp. 0

C.8 Uang Muka Belanja

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka

TA 2022 dan 2021

JENIS	TH 2022	TH 2021
Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2022 dan 2021

JENIS	TH 2022	TH 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp. 10.675.131,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.675.131,- dan Rp. 21.219.400,.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

			(Dalam Rupiah)
JENIS	**TH 2022**	**TH 2021**	**Mutasi**
Barang Konsumsi	10.675.131	21.219.400	(10.544.269)
Bahan Baku		-	-
Suku Cadang		-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat	-	-	-
Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	**10.675.131**	**21.219.400**	**(10.544.269)**

Rincian Persediaan berupa Alat Tulis Kantor di Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)
JENIS	NILAI
BARANG KONSUMSI	
Alat Tulis	734.860
Penjepit Kertas	388.750
Penghapus/Korektor	100.000
Buku Tulis	111.000
Ordner Dan Map	1.655.645
Cutter (Alat Tulis Kantor)	335.540
Alat Perekat	390.385
Stadler HD	110.000
Staples	444.000
Isi Staples	430.800
Alat Tulis Kantor Lainnya	1.157.441
Kertas HVS	1.749.500
Berbagai Kertas	230.500
Amplop	322.060
Kertas Dan Cover Lainnya	55.500
Tinta/Toner Printer	1.848.150
Bahan Komputer Lainnya	476.000
Batu Baterai	135.000
Jumlah Barang Konsumsi	10.675.131

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Satuan Kerja	**Tahun 2022**
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	3.005.630
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	3.800.751
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	3.009.350
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	260.000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	599.400
Jumlah	**10.675.131**

Persediaan yang belum diregister Rp.0

C.10.1. Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-
Barang untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Nilai Persediaan yang belum diregister per satker dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	**-**

Tagihan TP/TGR Rp. 0.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

PenyisihanPiutangTak Tertagih-Piutang NonLancar Rp. 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp. 0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp**	**-**

Peralatan dan Mesin

Rp. 59.425.783.061

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.59.425.783.061,- dan Rp. 65.826.805.591,-.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**Rp**	**65.826.805.591**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1.850.583.340
Hibah		
Transfer Masuk	Rp	-
Penggunaan Kembali Aset Tetap	Rp	306.775.000
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	1.939.179.070
Reklasifikasi keluar	Rp	773.345.750
Penghapusan	Rp	5.845.856.050
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**59.425.783.061**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	(45.551.750.573)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp**	**13.874.032.488**

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

  Mutasi tambah berasal dari pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.287.783.240 dan mutasi kurang sebesar Rp. 1.939.179.070 merupakan penghentian dari penggunaan.
- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

  Mutasi tambah berasal dari penggunaan kembali aset yang telah dihentikan penggunaannya senilai Rp.306.775.000 dan Mutasi kurang karena Lelang sejumlah Rp.644.161.000
- Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Mutasi tambah berasal dari reklasifikasi masuk senilai Rp.539.540.100 dan mutasi kurang berupa reklasifikasi keluar aset lainnya senilai Rp.1.617.293.850.

- Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan

  Mutasi tambah berasal dari pembelian LCD/Proyektor sebesar Rp.23.260.000 Mutasi kurang berasal dari Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp.1.929.052.600 dan Rp. 1.655.348.600 dengan rincian bukti pembayaran terlampir.

- Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

  Mutasi kurang berasal dari penjualan peralatan mesin sebesar Rp.773.345.750 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28.948.455.567
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	6.411.523.657
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	4.399.658.332
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	14.528.824.700
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	5.137.320.805
Jumlah	**59.425.783.061**

`Gedung dan Bangunan Rp.46.605.855.025

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.47.890.137.643,- dan Rp. 46.605.855.025,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**46.605.855.025**
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung	-
Pengembangan Pembangunan	1.306.952.618
Koreksi pencatatan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(22.670.000)
Saldo per 31 Desember 2022	**47.890.137.643**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(6.048.128.008)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**41.842.009.635**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.13.687.694.174,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.13.687.694.174,- dan Rp.13.687.694.174,-. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan listrik.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp 13.687.694.174**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi	Rp -
Pengembangan Jaringan Listrik	Rp -
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp 13.687.694.174**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp (1.350.012.180)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp 12.337.681.994**

Aset Tetap Lainnya Rp. 3.522.153.447

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 3.522.153.447,- dan Rp. 3.522.153.447,-.

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp 3.522.153.447**
Mutasi tambah:	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp 3.522.153.447**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp 3.522.153.447**

Aset Tetap Lainnya berupa Pembelian Buku Perpustakaan (monografi) pada satker Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai referensi para peneliti/perekayasa. Rincian Aset Tetap Lainnya per satker di Lingkungan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	2.506.522.165
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	51.088.250
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	410.506.030
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	236.146.790
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	317.890.212
Jumlah	**3.522.153.447**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Saldo KDP saat ini Rp.0 mutasi tambah sebesar Rp.1.306.952.618,- dan mutasi kurang sebesar Rp.1.306.952.618,- .

Mutasi tambah didapat dengan pelaksanaan 2 KDP, yaitu:

1. Parkir
2. Auditorium

Kedua KDP tersebut sudah dikapitalisasikan ke aset utama dengan parkir terhadap bangunan gedung kantor utama dan auditorium ke gedung pertemuan.

Akumulasi Penyusutan Aset

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31

Tetap Rp.(52.949.890.761)

Desember 2021 adalah masing-masing Rp. (52.949.890.761),- dan Rp. (52.974.785.528),-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	59.425.783.061	(45.551.750.573)	13.874.032.488
2	Gedung dan Bangunan	47.890.137.643	(6.048.128.008)	41.842.009.635
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.687.694.174	(1.350.012.180)	12.337.681.994
4	Aset Tetap Lainnya	3.522.153.447	-	3.522.153.447
Akumulasi Penyusutan		**124.525.768.325**	**(52.949.890.761)**	**71.575.877.564**

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp. 2.361.619.000

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.361.619.000,- dan Rp. 2.263.384.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 2.361.619.000
2	Lisensi	
3	Hasil Kajian/Penelitian	
Jumlah Nilai		**Rp 2.361.619.000**

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**2,263,384,000**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	98,235,000
Reklasifikasi Masuk	Rp	108,932,070
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar	Rp	108,932,070
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**2,361,619,000**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	Rp	(860,207,751)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**Rp**	**1,501,411,249**

Mutasi tambah berasal dari pengembangan aplikasi dari satker Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi senilai Rp.98.235.000, Rekalisifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar dari satker Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda.

Aset tak berwujud per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1.526.599.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	263.950.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaa	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	571.070.000
Jumlah	**2.361.619.000**

Rincian Aset Tak Berwujud tersaji pada lampiran (*software* komputer)

Aset Lain-Lain
Rp. 479.648.500

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 20201 adalah Rp.479.648.500,- dan Rp.4.489.769.330,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Transportasi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset lain-lain terdiri dari dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**4,489,769,330**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	7,816,942,300
Mutasi kurang:	
Penghapusan Dengan Cara Lelang	(11,520,288,130)
Penghapusan Dengan Cara Pemusnahan	-
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	(306,775,000)
Penghapusan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-
Saldo per 31 Desember 2021	**479,648,500**

Mutasi kurang berasal dari transaksi penghapusan dengan cara lelang berupa Inventaris Peralatan Kantor dengan rincian terlampir dan penggunaan kembali aset pada satker Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp.(1.695.227.751,-)

C.23.1 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. (1.695.227.751),- dan Rp. (1.297.295.501),-. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	Rp 2.361.619.000	Rp (1.695.227.751)	Rp 666.391.249

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain Rp.(469.177.053)

C.23.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. (469.177.053),- dan Rp. (4.477.747.249),-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain			
Aset Tetap Tidak digunakan operasional	479.648.500	(469.177.053)	10.471.447
ATB Tidak digunakan dalam Operasional		0	0
Jumlah	479.648.500	(469.177.053)	10.471.447
Jumlah	**479.648.500**	**(469.177.053)**	**10.471.447**

Uang Muka dari KPPN Rp. 0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Saldo Uang Muka dari KPPN per satker dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 150.332.000

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 150.332.000,-. dan Rp. 61.914.000,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai utang tersebut merupakan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar berupa Uang Makan Bulan Desember 2022.

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	150.332.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	**150.332.000**

Utang Yang Belum Ditagihkan
Rp. 0

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	**-**

Beban yang Masih harus Dibayar
Rp. 0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas
Rp. 72.113.083.391

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.72.113.083.391,- dan Rp.77.605.138.689,- Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Ekuitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	67.302.188.415
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	768.228.984
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.424.890.475
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perk	1.486.801.514
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1.130.974.003
Jumlah	**72.113.083.391**

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp.0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.536.479.368,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya	-	536.479.368	(100)
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	**-**	**536.479.368**	**(100)**

*Beban Pegawai Rp.*31.032.552.813,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.31.032.552.813.,- dan Rp. 31.241.521.586,-.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	31.032.552.813	31.241.521.586	(0,67)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	**31.032.552.813**	**31.241.521.586**	**(0,67)**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Terdapat perbedaan antara beban pegawai dengan realisasi belanja pegawai, hal ini dikarenakan adanya pengakuan akrual pada jurnal transaksi.

- Berdasarkan Memo Penyesuaian Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tanggal 31 Desember 2022 telah

dilakukan Jurnal Penyesuaian berupa :

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	61.914.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS		61.914.000

Merupakan belanja pegawai berupa uang makan bulan Desember Tahun 2021 yang masih harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022.

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		150.332.000
511129	Beban Uang Makan PNS	150.332.000	

Merupakan kewajiban belanja pegawai yang masih harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023 berupa uang makan bulan Desember Tahun 2022.

Beban Persediaan Rp1.913.687.188,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing – masing sebesar Rp. 1.913.687.188,- dan Rp. 2.842.140.560,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

TA 2022 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.913.687.188	2.842.140.560	(32,67)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**1.913.687.188**	**2.842.140.560**	**(32,67)**

Beban Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	404.310.195
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	500.987.183
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	343.487.550
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	224.406.500
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	440.495.760
Jumlah	**1.913.687.188**

Beban Barang dan Jasa Rp. 33.185.291.784,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 33.185.291.784,- dan Rp. 66.435.416.629,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Barang dan Jasa per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	21.142.629.779
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	3.077.432.761
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	2.044.958.481
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	3.758.820.656
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	3.161.450.107
Jumlah	**33.185.291.784**

Beban Pemeliharaan Rp. 4.628.711.168,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.628.711.168,- dan Rp. 3.613.945.613,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.582.954.575	1.830.458.433	(29,13)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.045.756.593	1.783.487.180	(12,82)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain	-		-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			
Jumlah	**4.628.711.168**	**3.613.945.613**	**(21,92)**

Beban pemeliharaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	3.261.017.011
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	439.374.793
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	376.273.022
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	294.336.442
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	257.709.900
Jumlah	**4.628.711.168**

Beban Perjalanan Dinas Rp. 23.866.256.970,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.23.866.256.970,- dan Rp. 28.802.759.104,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	7.121.228.013
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	4.021.834.330
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	4.352.448.491
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Tranportasi Perkotaan	5.002.733.623
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	3.368.012.513
Jumlah	**23.866.256.970**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0- dan Rp. 0,-.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK/ TURUN %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Beban Bantuan Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial

TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.7.766.969.578

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.766.969.578,- dan Rp.7.587.692.101,-.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	5.654.374.489
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	485.006.349
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	387.266.497
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	814.095.543
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	426.226.700
Jumlah	**7.766.969.578**

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih *Rp. 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.1.135.343.995

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% NAIK (TURUN)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	150.373.753	543.711.493	(72,34)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	333.609.003	617.977.993	(46,02)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	183.235.250	74.266.500	146,73
Defisit Selisih Kurs	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya	984.970.242	187.464.813	425,42
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainya	-	187.464.813	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**984.970.242**	**1.087.422.986**	**(9,42)**

**) Pendapatan/Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Penyesuaian Nilai Persediaan yang timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2019.*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	77.875.980
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	336.116.462
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	88.805.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	287.490.753
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	345.055.800
Jumlah	**1.135.343.995**

Pos-Pos Luar Biasa Rp. 0

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Pendapatan PNBP	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Defisit Pos Luar Biasa	**0**	**0**	**0,00**

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Rp.(101.258.125.506)

D.13 Surplus/(Defisit) LO

Surplus / (defisit) LO merupakan pendapatan atau beban yang terdapat pada entitas. Rincian Surplus / (defisit) LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar minus Rp. (101.258.125.506),- dan Rp. (139.986.996.225),-.

Surplus / (defisit) LO per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	(68.538.236.320)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	(8.188.518.954)
Pusat kebijakan Prasarana Transportasi	(7.415.629.041)
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	(9.806.902.011)
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	(7.308.839.180)
Jumlah	**(101.258.125.506)**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp. 77.605.138.689

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.605.138.689.,- dan Rp. 71.253.603.288,-. Ekuitas awal per satker di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	70.520.654.525
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	2.455.118.807
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	1.264.091.232
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	1.808.554.022
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1.556.720.103
Jumlah	**77.605.138.689**

Defisit LO
Rp. (101.258.125.506)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp.(101.258.125.506),- dan Rp. (139.255.819.919),-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit LO per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per Desember 2022 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	(68.538.236.320)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	(8.188.518.954)
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	(7.415.629.041)
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	(9.806.902.011)
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	(7.308.839.180)
Jumlah	**(101.258.125.506)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp. 0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp. 0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Klasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp0-.

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Reklasifikasi Aset Tak Berwujud	-
Koreksi Reklasifikasi Peralatan dan Mesin	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Koreksi Aset Non Revaluasi Rp.12.224.989

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.(12.224.989),- dan Rp.(60.876.271),-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(12.224.989)
Jumlah	**(12.224.989)**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-20.474.989
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	8.250.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	**(12.224.989)**

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

  Koreksi nilai berkurang dengan pada Gedung Bangunan pada satker Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan nilai kapitalisasi ATR oleh KNKT yang menjadi temuan Inspektorat Jenderal pada TA 2021 yang merupakan nilai (telah dikurangi oleh

penyusutan) senilai Rp.(20.474.989).

- Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Terdapat selisih senilai Rp.8.250.000 akibat adanya jurnal penyesuaian dari:

  - DR Pendapatan Perolehan Aset Lainnya: Rp.396.761.200
  - CR Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi: Rp.396.761.200

    Pada KoreksiNilai Aset Tetap Non Revaluasi sebelumnya senilai Rp.333.506.800 sehingga dalam neraca seperti ini:
  - Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Kredit): Rp.63.254.400
  - Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (Debit): Rp.55.004.400

Sehingga terdapat selisih senilai Rp.8.250.000.

Koreksi Lain-lain Rp. 2.618.528

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.618.528,- dan Rp. 0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi Lainnya merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pada gaji pegawai akibat kelebihan bayar gaji golongan III/d yang seharusnya III/c dengan jumlah senilai Rp.11.783.376,- pemotongan dilakukan selama 36 bulan dimulai bulan September 2019 hingga Agustus 2022 namun telah ditindaklanjuti dengan koreksi SPM pada tanggal 8 Februari 2023.

Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Koreksi Lainnya	2.618.528
Jumlah	**2.618.528**

Transaksi Antar Entitas
Rp. 95.780.913.725

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.95.780.913.725,- dan Rp.145.668.231.591,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL,antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.315.960.717)
Ditagihkan ke Entitas Lain	97.096.874.442
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	**95.780.913.725**

Nilai Transaksi Antar Entitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2022
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	65.342.863.727
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	7.692.656.706
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	7.023.715.494
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	8.838.584.718
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	6.883.093.080
Jumlah	**95.780.913.725**

(DDEL)/(DKEL)
Rp. (1.315.960.717)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp. (1.315.960.717),- sedangkan DKEL sebesar Rp. 97.096.874.442,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk/Transfer Keluar posisi 31 Desember 2022 Rp.0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
2	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
		Barang	Rp -
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Ekuitas Akhir

Rp. 72.113.083.391

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.72.113.083.391,- dan Rp. 77.605.138.689,-.

Nilai ekuitas akhir per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Satuan Kerja	**Tahun 2021**
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	67.302.188.415
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	768.228.984
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	1.424.890.475
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	1.486.801.514
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1.130.974.003
Jumlah	**72.113.083.391**

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi terdapat 5 (lima) satuan kerja dengan jumlah rekening masing-masing telah mendapat persetujuan dari KPPN Jakarta IV atas nama masing-masing Satuan Kerja Eselon II di satuan kerja terkait.

No	Kantor/Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	9891542887521000	BNI Cabang Harmoni
2	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	9891542889441000	BNI Cabang Harmoni
3	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	9891542889511000	BNI Cabang Harmoni
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	9891544142671000	BNI Cabang Harmoni
5	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	8100126341711000	Bank Mandiri

Berdasarkan surat permohonan Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker pada PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor KU/202/01/03/BKT/2022 tanggal 17 Oktober 2022 untuk satker yang menggunakan rekening BNI dan Nomor KU.202/01/02/BKT/2022 tanggal 17 Oktober 2022 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri. Pembukaan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker *(Virtual Account)* telah disetujui oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan sesuai Surat Nomor S-3039/KPN.1204/2022 untuk satker yang menggunakan rekening BNI dan Nomor S-3040/KPN.1204/2022 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri tanggal 21 Oktober 2022 dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Kantor/Satuan Kerja	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badan Kebijakan Transportasi	RKK BALITBANG PERHUBUNGAN KEMENHUB OPS	RKK BAKAN TRANS KEMENHUB OPS
2	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	BPG 133 SEK BALITBANG KEMENHUB	BPG 133 SEK BAKAN TRANS KEMENHUB
3	Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	BPG 133 PUSKEBIJAKAN TRANSPORTASI TJP	BPG 133 PUSKAN LATP
4	Pusat Kebijakan Transportasi Sarana Transportasi	BPG 133 PUSKEBIJAKAN TRANSPORTASI TLSDP	BPG 133 PUSKAN SARANA TRANS
5	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	BPG 133 TRANSPORTASI UDARA	BPG 133 PUSKAN PRAS TDI
6	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	BPG 133 PUSKEBIJAKAN TRANSPORTASI TRANSPORTASI ANTARMODA	BPG 133 PUSKAN KSLMN DAN TRANS

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Penjelasan COVID-19

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19, Badan Kebijakan Transportasi melakukan beberapa langkah pencegahan di Lingkungan Internal. Beberapa upaya Pencegahan internal yang dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan di area gedung kantor Badan Kebijakan Transportasi.

Anggaran untuk untuk Kegiatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sejumlah Rp 3.191.273.000 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) termasuk dalam DIPA Nomor DIPA/022.11-0/2022 TA 2022 Badan Kebijakan Transportasi Tanggal 17 November 2021.

521131 Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 2.584.733.000

521241 Belanja Barang Non Operasional -Penanganan Pandemi Covid-19 dengan pagu sebesar Rp. 26.319.000

522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 580.221.000

Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 terlampir sebagai berikut:

Akun	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	2.584.733.000	2.562.879.891	99%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	26.319.000	25.575.000	97%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	580.221.000	580.221.000	100%
532119	Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah		**3.191.273.000**	**3.168.675.891**	99%

SATKER	ANGGARAN	REALISASI	% Naik (TURUN)
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1.100.205.000	1.100.204.000	(0,00)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	569.792.000	559.886.252	(1,74)
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	418.836.000	416.712.461	(0,51)
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	614.400.000	604.605.877	(1,59)
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	488.040.000	487.267.301	(0,16)
Jumlah	**3.191.273.000**	**3.168.675.891**	**(0,71)**

2. Transfer Masuk

Tidak Ada

3. Pejabat Pengelola Keuangan

Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 sebagai berikut:

Satker / Jabatan	Nama
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	
Kuasa Pengguna Anggaran	Pandu Yunianto, A.TD., M.Eng., SE
Pejabat Pembuat Komitmen	Ferdian Danu T, ST., M.Sc / Joshua Kevin, A.Md
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Gallen Restu Pradika, S.Ak.
Bendahara	Anggun Pitaloka, A.Md
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	
Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Gunung Hutapea, M.M.
Pejabat Pembuat Komitmen	Teguh Pairunan Putra, S.T., M.M.
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Kris Ferdiyanto, S.E.
Bendahara	Muhammad Rizal
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	
Kuasa Pengguna Anggaran	Capt. Noviyanto Widadi, S.AP., M.M
Pejabat Pembuat Komitmen	Ali Murthado, S.T.
Pejabat Pembuat Komitmen (per November 2022)	Boy Jhoustroy Limbong
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Harry Yanto Lumban Batu, S.KOM., M.
Bendahara	Vinny Isnania Astuti, A.Md.
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	
Kuasa Pengguna Anggaran	Eddy Gunawan, ATD., M.Eng.SC.
Pejabat Pembuat Komitmen	Hartono, S.AP
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Sri Hapsari Winahyu, SE., MT
Bendahara	Listifadah, S.Si., M.Sc
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Ir. Makjen Sinaga, M.T.
Pejabat Pembuat Komitmen	Agung Wicaksono, S.H.
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Ganang Restu Bariadi
Bendahara	Didok Sencoko, A.Md.

4. Perubahan Nomenlaktur Anggaran

Sehubungan dengan telah terbitnya Perpres 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka perubahan

organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana ditetapkan melalui surat Menteri PAN-RB Nomor B/723/M.KT.01/2022 tanggal 15 Juali 2022 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dengan pengesahan revisi administrative ini, nomenlaktur unit Eselon I dan satker mengalami perubahan sebagai berikut:

KODE	SEMULA	MENJADI
288752	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
288944	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
288951	Puslitbang Transportasi Udara	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan InIntegrasi Moda
414267	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
634171	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

5. Penjelasan Jurnal Penyesuaian

- Berdasarkan Memo Penyesuaian Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tanggal 31 Desember 2022 telah dilakukan Jurnal Penyesuaian berupa :

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	61.914.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS		61.914.000

Merupakan belanja pegawai berupa uang makan bulan Desember Tahun 2021 yang masih harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022.

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		150.332.000
511129	Beban Uang Makan PNS	150.332.000	

Merupakan kewajiban belanja pegawai yang masih harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023 berupa uang makan bulan Desember Tahun 2022.

- Berdasarkan Memo Penyesuaian Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda tanggal 31 Desember 2022 telah dilakukan Jurnal Penyesuaian berupa:

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		396.761.200
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	396.761.200	

Merupakan hasil reklasifikasi peralatan mesin berupa *acces control* sebesar Rp.396.761.200 yang telah dikoreksi pencatatannya menjadi ATB dan peralatan mesin memunculkan akun pendapatan perolehan aset lainnya (491429) pada kredit di laporan neraca percobaan akrual sehingga perlu untuk melakukan jurnal koreksi pencatatan aset pada akun pendapatan perolehan aset lainnya (491429) di debit dan akun Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (391116) di kredit.

7. Blokir Anggaran pada Badan Kebijakan Transportasi

a. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2022 dan Surat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KU.001/11/6 PHB 2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2022, alokasi Automatic Adjustment Tahap I adalah Rp.979.845.413.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dan Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp.6.693.209.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang bersumber dari Pagu Sekretariat Badan Litbang Perhubungan;

b. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2022, Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi Automatic Adjustment sebesar Rp.1.174.486.913.000 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dari rupiah murni belanja non operasional dan belanja modal.

c. Berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KU.204/3/14PHB2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2022, alokasi penambahan Automatic Adjustment Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp. 210.454.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

d. Menunjuk surat Menteri Keuangan nomor: S-243/MK.2/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Persetujuan Penghapusan Sebagian Blokir Automatic Adjustment TA 2022 Kementerian Perhubungan dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-524/AG/AG.3/2022 tanggal 6 September 2022 perihal

Pengesahan Revisi Anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 (Revisi V), menyetujui usulan penghapusan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp.1.264.018.000 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).

e. Menunjuk surat Menteri Keuangan nomor: S-357/MK.2/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Persetujuan Penghapusan Sebagian Blokir Automatic Adjustment TA 2022 Kementerian Perhubungan menyetujui usulan penghapusan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp.1.195.506.000 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) untuk pemenuhan kekurangan anggaran daya listrik dan Nataru.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:52 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	1,315,960,717	1,315,960,717	0	0	1,341,922,174	(1,341,922,174)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	1,315,960,717	1,315,960,717	0	0	1,341,922,174	(1,341,922,174)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	30,945,758,000	30,944,134,813	1,623,187	100	32,063,269,000	31,226,146,586	837,122,414	97
	BELANJA BARANG	63,782,782,000	63,583,402,841	199,379,159	100	102,254,138,000	101,673,266,161	580,871,839	99
	BELANJA MODAL	2,571,083,000	2,569,336,788	1,746,212	100	6,681,444,000	6,678,726,191	2,717,809	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:52 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	97,299,623,000	97,096,874,442	202,748,558	100	140,998,851,000	139,578,138,938	1,420,712,062	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:52 AM
Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	10,675,131	21,219,400	(10,544,269)	(49.69)
JUMLAH ASET LANCAR	**10,675,131**	**21,219,400**	**(10,544,269)**	**(49.69)**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	59,425,783,061	65,826,805,591	(6,401,022,530)	(9.72)
Gedung dan Bangunan	47,890,137,643	46,605,855,025	1,284,282,618	2.76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,687,694,174	13,687,694,174	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,522,153,447	3,522,153,447	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(52,949,890,761)	(52,974,785,528)	24,894,767	(0.05)
JUMLAH ASET TETAP	**71,575,877,564**	**76,667,722,709**	**(5,091,845,145)**	**(6.64)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,361,619,000	2,263,384,000	98,235,000	4.34
Aset Lain-lain	479,648,500	4,489,769,330	(4,010,120,830)	(89.32)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,164,404,804)	(5,775,042,750)	3,610,637,946	(62.52)
JUMLAH ASET LAINNYA	**676,862,696**	**978,110,580**	**(301,247,884)**	**(30.80)**
JUMLAH ASET	**72,263,415,391**	**77,667,052,689**	**(5,403,637,298)**	**(6.96)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	150,332,000	61,914,000	88,418,000	142.81
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**150,332,000**	**61,914,000**	**88,418,000**	**142.81**
JUMLAH KEWAJIBAN	**150,332,000**	**61,914,000**	**88,418,000**	**142.81**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	72,113,083,391	77,605,138,689	(5,492,055,298)	(7.08)
JUMLAH EKUITAS	**72,113,083,391**	**77,605,138,689**	**(5,492,055,298)**	**(7.08)**
JUMLAH EKUITAS	**72,113,083,391**	**77,605,138,689**	**(5,492,055,298)**	**(7.08)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**72,263,415,391**	**77,667,052,689**	**(5,403,637,298)**	**(6.96)**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:53 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,675,131	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	59,425,783,061	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	47,890,137,643	0
0.0	134113	Jaringan	13,687,694,174	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,522,153,447	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	45,551,750,573
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,048,128,008
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,350,012,180
0.0	162151	Software	2,361,619,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	479,648,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	469,177,053
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,695,227,751
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	150,332,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	97,096,874,442
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,315,960,717	0
0.0	391111	Ekuitas	0	77,605,138,689
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	42,779,411
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	55,004,400	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,618,528	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	333,609,003
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,317,203
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	975,653,039
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,148,911,015	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	192,703	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	646,696,448	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	178,205,993	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	742,260,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	911,570,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	78,409,906	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	554,809,620	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,462,024,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	358,170,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	15,951,303,128	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	10,570,306,091	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	531,122,933	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	143,750	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	907,455,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:53 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	492,412,080	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,562,879,891	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,475,271,646	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	482,770,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,685,140,467	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25,575,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,305,393,159	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	85,891,775	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	232,672,023	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	62,966,250	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	3,607,465,950	0
3.0	522141	Beban Sewa	991,725,490	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,372,580,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,213,299,279	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	580,221,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,582,954,575	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,045,756,593	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,843,831,088	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	127,888,494	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,235,240,792	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,475,803,436	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	183,493,160	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,747,929,237	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,235,624,984	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	383,932,473	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	397,932,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,550,634	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,913,687,188	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	183,235,250	0
JUMLAH			**231,327,999,352**	**231,327,999,352**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:53 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	97,096,874,442
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,315,960,717	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	333,609,003
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,698,675
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	975,653,039
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,148,911,015	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	192,703	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	646,696,448	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	178,205,993	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	742,260,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,570,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	78,409,906	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	554,809,620	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,373,606,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	358,170,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	15,951,303,128	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,570,306,091	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	531,122,933	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	143,750	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	907,455,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	492,412,080	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,562,879,891	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,475,271,646	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	482,770,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,685,140,467	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25,575,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,903,142,919	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,305,393,159	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	85,891,775	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	232,672,023	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	62,966,250	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	3,607,465,950	0
3.0	522141	Belanja Sewa	991,725,490	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,372,580,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,213,299,279	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	580,221,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,582,954,575	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 10:53 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,045,756,593	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,843,831,088	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	127,888,494	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,235,240,792	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,475,803,436	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	183,493,160	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,164,149,170	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,306,952,618	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	98,235,000	0
JUMLAH			**98,412,835,159**	**98,412,835,159**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:52 AM
Halaman : 1
lap_lo_es1

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	536,479,368	(536,479,368)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	536,479,368	(536,479,368)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	536,479,368	(536,479,368)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	31,032,552,813	31,241,521,586	(208,968,773)	-
Beban Persediaan	1,913,687,188	2,842,140,560	(928,453,372)	-
Beban Barang dan Jasa	33,185,291,784	66,435,416,629	(33,250,124,845)	-
Beban Pemeliharaan	4,628,711,168	3,613,945,613	1,014,765,555	-
Beban Perjalanan Dinas	23,866,256,970	28,802,759,104	(4,936,502,134)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 10:52 AM
Halaman : 2
lap_lo_es1

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7,766,969,578	7,587,692,101	179,277,477	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	102,393,469,501	140,523,475,593	(38,130,006,092)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(102,393,469,501)	(139,986,996,225)	37,593,526,724	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	150,373,753	543,711,493	(393,337,740)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	333,609,003	617,977,993	(284,368,990)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	183,235,250	74,266,500	108,968,750	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	984,970,242	187,464,813	797,505,429	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	984,970,242	187,464,813	797,505,429	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,135,343,995	731,176,306	404,167,689	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(101,258,125,506)	(139,255,819,919)	37,997,694,413	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(101,258,125,506)	(139,255,819,919)	37,997,694,413	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 10:52 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	77,605,138,689	71,253,603,288	6,351,535,401	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(101,258,125,506)	(139,255,819,919)	37,997,694,413	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(14,843,517)	(60,876,271)	46,032,754	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(12,224,989)	(60,876,271)	48,651,282	-
LAIN-LAIN	(2,618,528)	0	(2,618,528)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	95,780,913,725	145,668,231,591	(49,887,317,866)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,492,055,298)	6,351,535,401	(11,843,590,699)	-
EKUITAS AKHIR	72,113,083,391	77,605,138,689	(5,492,055,298)	-

Keterangan :

FINAL

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI (BA 022.11) TAHUN 2022 (*AUDITED*)
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2022 (*AUDITED*)

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **28 April 2023**, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Unit Eselon I Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11) Tahun 2022, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Eselon I Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11) Tahun 2022 dan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 (*Audited*).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah memasukkan usulan koreksi dari Satker/Unit Eselon I dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka kami menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini kepada Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan paling lambat tanggal **8 Mei 2023.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Biro Keuangan

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Fardian Isibhi
NIP. 19721204 200112 1 002

Mengetahui,
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.
NIP. 19760808 200501 2 005

1. Laporan Realisasi Anggaran

UAPPA-E1 : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

(dalam rupiah)

Kode Akun	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2022 (UNAUDITED)			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		SALDO 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
	PENDAPATAN										
425	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.315.960.717	-	1.315.960.717	-	-	-	-	1.315.960.717	-	1.315.960.717
424	Pendapatan BLU				-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.315.960.717**	**-**	**1.315.960.717**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.315.960.717**	**-**	**1.315.960.717**
	BELANJA										
51	Belanja Pegawai	30.944.134.813		30.944.134.813	-	-	-	-	30.944.134.813	-	30.944.134.813
52	Belanja Barang	63.583.402.841		63.583.402.841	-	-	-	-	63.583.402.841	-	63.583.402.841
53	Belanja Modal	2.569.336.788		2.569.336.788	-	-	-	-	2.569.336.788	-	2.569.336.788
	JUMLAH BELANJA	**97.096.874.442**	**-**	**97.096.874.442**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.096.874.442**	**-**	**97.096.874.442**

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Biro Keuangan

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Fardian Isibhi
NIP. 19721204 200112 1 002

Mengetahui,
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.
NIP. 19760808 200501 2 005

2. Neraca

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
E1 : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

URAIAN	SALDO 31 Desember 2021 (Audited)	SALDO 31 Desember 2022 (*Unaudited*)	KOREKSI AUDITED				SALDO 31 Desember 2022 (*Audited*)
			JURNAL PENYESUAIAN		JURNAL REKLASIFIKASI		
			DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
Aset Lancar							
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-	-	-	-
Kas pada Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka Belanja (Prepayment)	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbend	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti R	-	-	-	-	-	-	-
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-	-	-	-
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)	-	-	-	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BL	-	-	-	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Nett	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan	*21.219.400*	*10.675.131*	-	-	-	-	10.675.131
Persediaan Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Belum Diregister	-	-	-	-	-	-	-
Total Aset Lancar	**21.219.400**	**10.675.131**					**10.675.131**
Aset Tetap							-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Belum Diregister	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	65.826.805.591	59.425.783.061	-	-	-	-	59.425.783.061
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin Belum diregister Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	46.605.855.025	47.890.137.643	-	-	-	-	47.890.137.643
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	13.687.694.174	13.687.694.174	-	-	-	-	13.687.694.174
Jalan Irigasi dan Jaringan Belum di register	-	-	-	-	-	-	-
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	3.522.153.447	3.522.153.447	-	-	-	-	3.522.153.447
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(52.974.785.528)**	**(52.949.890.761)**					**(52.949.890.761)**
Akumulasi Penyusutan PM	(47.194.007.786)	(45.551.750.573)	-	-	-	-	(45.551.750.573)
Akumulasi Penyusutan GB	(4.814.698.035)	(6.048.128.008)	-	-	-	-	(6.048.128.008)
Akumulasi Penyusutan JIJ	(966.079.707)	(1.350.012.180)	-	-	-	-	(1.350.012.180)
Akumulasi Penyusutan ATL	-	-	-	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Belum diregister	-	-	-	-	-	-	-
Total Aset Tetap	**76.667.722.709**	**71.575.877.564**	-	-	-	-	**71.575.877.564**
Properti Investasi			-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Total Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang			-	-	-	-	-
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntut	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Total Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lainnya			-	-	-	-	-
Kemiteraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	2.263.384.000	2.361.619.000	-	-	-	-	2.361.619.000
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU	-	-	-	-	-	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain-lain	4.489.769.330	479.648.500	-	-	-	-	479.648.500
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lainnya yang belum diregister	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**(5.775.042.750)**	**(2.164.404.804)**	-	-	-	-	**(2.164.404.804)**
Akum. Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset lain lain Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi	(4.477.747.249)	(469.177.053)	-	-	-	-	(469.177.053)
Akum. Amortisasi Hak Cipta	-	-	-	-	-	-	-
Akum. Amortisasi Paten	-	-	-	-	-	-	-
Akum. Amortisasi Software	(1.297.295.501)	(1.695.227.751)	-	-	-	-	(1.695.227.751)
Akum. Amortisasi Lisensi	-	-	-	-	-	-	-
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam op	-	-	-	-	-	-	-
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud-BLU	-	-	-	-	-	-	-
Total Aset Lainnya	**978.110.580**	**676.862.696**	-	-	-	-	**676.862.696**
Total Aset	**77.667.052.689**	**72.263.415.391**	-	-	-	-	**72.263.415.391**

URAIAN	SALDO 31 Desember 2021 (Audited)	SALDO 31 Desember 2022 (*Unaudited*)	KOREKSI AUDITED				SALDO 31 Desember 2022 (*Audited*)
			JURNAL PENYESUAIAN		JURNAL REKLASIFIKASI		
			DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
Kewajiban Jangka Pendek			-	-	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	61.914.000	150.332.000	-	-	-	-	150.332.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
Utang yang Belum ditagihkan	-	-	-	-	-	-	-
Hibah yang belum disahkan	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Total Kewajiban Jangka Pendek	**61.914.000**	**150.332.000**	-	-	-	-	**150.332.000**
Kewajiban Jangka Panjang			-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	-	-	-	-	-	-
Total Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
Total Kewajiban	61.914.000	150.332.000	-	-	-	-	150.332.000
EKUITAS	77.605.138.689	72.113.083.391	-	-	-	-	72.113.083.391
KEWAJIBAN + EKUITAS	**77.667.052.689**	**72.263.415.391**	-	-	-	-	**72.263.415.391**

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Biro Keuangan

Pustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Faridian Isibhi
NIP. 19721204 200112 1 002

Mengetahui,
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.
NIP. 19760808 200501 2 005

3. LAPORAN OPERASIONAL

UAPPA-E1 : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

URAIAN	SALDO 31 Desember 2021 (Audited)	SALDO 31 Desember 2022 (Unaudited)	KOREKSI AUDITED				SALDO 31 Desember 2022 (AUDITED)
			JURNAL PENYESUAIAN		JURNAL REKLASIFIKASI		
			DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL							
PENDAPATAN							
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK							
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	536.479.368	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**536.479.368**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BEBAN							
Beban Pegawai	31.241.521.586	31.032.552.813	-	-	-	-	31.032.552.813
Beban Persediaan	2.842.140.560	1.913.687.188	-	-	-	-	1.913.687.188
Beban Barang dan Jasa	66.435.416.629	33.185.291.784	-	-	-	-	33.185.291.784
Beban Pemeliharaan	3.613.945.613	4.628.711.168	-	-	-	-	4.628.711.168
Beban Perjalanan Dinas	28.802.759.104	23.866.256.970	-	-	-	-	23.866.256.970
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.587.692.101	7.766.969.578	-	-	-	-	7.766.969.578
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Operasional	**140.523.475.593**	**102.393.469.501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.393.469.501**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(139.986.996.225)**	**(102.393.469.501)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(102.393.469.501)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL							
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR							
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	617.977.993	333.609.003	-	-	-	-	333.609.003
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	74.266.500	183.235.250	-	-	-	-	183.235.250
Jumlah Surplu/(Defisit) Pelepasan Non Aset Lancar	**543.711.493**	**150.373.753**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.373.753**
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplu/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA							-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	187.464.813	984.970.242	-	-	-	-	984.970.242
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplu/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**187.464.813**	**984.970.242**	**-**	**-**	**-**	**-**	**984.970.242**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**731.176.306**	**1.135.343.995**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.135.343.995**
POS LUAR BIASA							
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	**(139.255.819.919)**	**(101.258.125.506)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(101.258.125.506)**

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Biro Keuangan

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

Mengetahui,
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.
NIP. 19760808 200501 2 005

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Fardian Isibhi
NIP. 19721204 200112 1 002

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UAPPA-E1 : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

URAIAN	SALDO 31 Desember 2021 (*Audited*)	SALDO 31 Desember 2022 (*Unaudited*)	KOREKSI AUDITED - NON REVAL				SALDO 31 Desember 2022 (AUDITED)
			JURNAL PENYESUAIAN		JURNAL REKLASIFIKASI		
			DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
EKUITAS AWAL	**71.253.603.288,00**	**77.605.138.689,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.605.138.689**
SURPLUS/DEFISIT LO	**(139.255.819.919,00)**	**(101.258.125.506,00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(101.258.125.506)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**(60.876.271,00)**	**(14.843.517,00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(14.843.517)**
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(60.876.271,00)	42.779.411,00	-	-	-	-	42.779.411
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0,00	(55.004.400,00)	-	-	-	-	(55.004.400)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(60.876.271,00)	(12.224.989,00)	-	-	-	-	(12.224.989)
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Koreksi Lainnya	0,00	(2.618.528,00)	-	-	-	-	(2.618.528)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**145.668.231.591,00**	**95.780.913.725,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.780.913.725**
Ditagihkan ke Entitas Lain	139.578.138.938,00	97.096.874.442,00	-	-	-	-	97.096.874.442
Diterima dari Entitas Lain	(1.341.922.174,00)	(1.315.960.717,00)	-	-	-	-	(1.315.960.717)
Transfer Keluar	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Transfer Masuk	7.432.014.827,00	0,00	-	-	-	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Setoran Surplus BLU	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**6.351.535.401,00**	**(5.492.055.298,00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5.492.055.298)**
EKUITAS AKHIR	**77.605.138.689,00**	**72.113.083.391,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.113.083.391**

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Biro Keuangan

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

Mengetahui,
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.
NIP. 19760808 200501 2 005

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Fardlan Isibhi
NIP. 19721204 200112 1 002

JURNAL KOREKSI KAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENHUB TAHUN 2022 [*Audited*]

NO JURNAL	KODE AKUN	AKUN 4 DIGIT	AKUN 3 DIGIT	AKUN 2 DIGIT	NAMA AKUN	KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		PENJELASAN JURNAL (UNTUK DIISI DALAM KETERANGAN APLIKASI)	KODE SATKER	NAMA SATKER	ESELON I	AUDITOR	KETERANGAN	
						DR	CR	DR	CR						JENIS JURNAL (MANDIRI /	DARI MODUL?
					NIHIL					NIHIL		NIHIL				
JUMLAH						-	-	-	-							

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Biro Keuangan

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Fardian Isibhi
NIP. 19721204 200112 1 002

Mengetahui,
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.
NIP. 19760808 200501 2 005

JURNAL KOREKSI AKRUAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENHUB TAHUN 2022 [*Audited*]

NOMOR JURNAL	KODE AKUN	AKUN 4 DIGIT	AKUN 3 DIGIT	AKUN 2 DIGIT	NAMA AKUN	JURNAL PENYESUAIAN		JURNAL REKLASIFIKASI		PENJELASAN JURNAL (UNTUK DIISI DALAM KETERANGAN APLIKASI)	KODE SATKER	NAMA SATKER	ESELON I	AUDITOR	KETERANGAN	
						DR	CR	DR	CR						JENIS JURNAL (BPK / MANDIRI)	MODUL*
					NIHIL					NIHIL			NIHIL			

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Biro Keuangan

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

Mengetahui,
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.
NIP. 19760808 200501 2 005

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Kebijakan Transportasi (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Pardian Isibhi
NIP. 19721204 200112 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA IV
JL. IR. H. JUANDA NO. 19, JAKARTA PUSAT 10120; TELEPON (021) 3516657; FAKSIMILI (021) 3812301;
SUREL : KPPN133@GMAIL.COM; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA4

Nomor : S-3039/KPN.1204/2022 21 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker (Virtual Account)

Yth. Direktur Hubungan Kelembagaan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
2. Surat kami Nomor S-2535/WPB.12/KP.04/2020 tanggal 15 Juni 2020 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Induk Operasional Atas Nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
3. Surat Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.202/01/03/BKT/2022 tanggal 17 Oktober 2022 hal Permohonan Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker pada PT. BNI (Persero) Tbk.

Dengan ini diminta bantuan Bapak untuk mengubah nama atas nomor Rekening sebagai berikut:

1. Nomor Rekening : 202100047
   Nama Rekening Awal : RKK BALITBANG PERHUBUNGAN KEMENHUB OPS
   Nama Rekening Menjadi : RKK BAKAN TRANS KEMENHUB OPS
   Alasan Perubahan : Perubahan Nomenklatur
2. Nomor Rekening : 9891542887521000
   Nama Rekening Awal : BPG: 133 SEK BALITBANG KEMENHUB
   Menjadi : BPG 133 SEK BAKAN TRANS KEMENHUB
   Alasan Perubahan : Perubahan Nomenklatur
3. Nomor Rekening : 9891544142671000
   Nama Rekening Awal : BPG 133 PUSLITBANG TJP
   Menjadi : BPG 133 PUSKAN LATP
   Alasan Perubahan : Perubahan Nomenklatur
4. Nomor Rekening : 9891542889441000
   Nama Rekening Awal : BPG: 133 PUSLITBANG TLSDP
   Menjadi : BPG 133 PUSKAN SARANA TRANS
   Alasan Perubahan : Perubahan Nomenklatur
5. Nomor Rekening : 9891542889511000
   Nama Rekening Awal : BPG: 133 PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA
   Menjadi : BPG 133 PUSKAN PRAS TDI
   Alasan Perubahan : Perubahan Nomenklatur

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jakarta IV

Ditandatangani secara elektronik
Saor Silitonga

Tembusan:
1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA IV
JL. IR. H. JUANDA NO. 19, JAKARTA PUSAT 10120; TELEPON (021) 3516657; FAKSIMILI (021) 3812301;
SUREL : KPPN133@GMAIL.COM; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA4

Nomor : S-3040/KPN.1204/2022 — 21 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker (Virtual Account)

Yth. Direktur Hubungan kelembagaan, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
2. Surat kami Nomor S-2534/WPB.12/KP.04/2020 tanggal 15 Juni 2020 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Induk Operasional Atas Nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
3. Surat Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.202/01/02/BKT/2022 tanggal 17 Oktober 2022 hal Permohonan Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dengan ini diminta bantuan Bapak untuk mengubah nama atas nomor Rekening sebagai berikut:

1.	Nomor Rekening	:	1210009818497
	Nama Rekening Awal	:	RKK BALITBANG PERHUBUNGAN KEMENHUB OPS
	Nama Rekening Menjadi	:	RKK BAKAN TRANS KEMENHUB OPS
	Alasan Perubahan	:	Perubahan Nomenklatur
2.	Nomor Rekening	:	8100126341711000
	Nama Rekening Awal	:	BPG: 133 PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA
	Menjadi	:	BPG 133 PUSKAN KSLMN DAN TRANS
	Alasan Perubahan	:	Perubahan Nomenklatur

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jakarta IV

Ditandatangani secara elektronik
Saor Silitonga

Tembusan:
1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-771/AG/AG.3/2022 02 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Revisi Administratif Perubahan Nomenklatur Unit Eselon I dan Satker Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
di Jakarta

Sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana ditetapkan melalui surat Menteri PAN-RB nomor B/723/M.KT.01/2022 tanggal 15 Juli 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan revisi administratif perubahan/penyesuaian nomenklatur unit eselon I dan satker, sebagaimana disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: KU.002/15/24 PHB 2022 tanggal 28 September 2022 hal Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Badan Kebijakan Trasportasi) TA. 2022, telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA dan SPAN TA 2022 pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan revisi administratif ini, nomenklatur unit eselon I dan satker akan mengalami perubahan sebagai berikut:

Kode	Semula	Menjadi
022.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Badan Kebijakan Trasportasi
288752	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
288944	PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
288951	PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
414267	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
634171	PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman

Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Pujihastuti

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

Nomor : UM.105/1/7/KNKT/2022 Jakarta, 26 Juli 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Koreksi Nilai Aset

Kepada
Yth. Sekretaris Badan Litbang,
Kementerian Perhubungan

Menindaklanjuti hasil audit Inspektorat IV Kementerian Perhubungan dengan hormat disampaikan bahwa pada pekerjaan Revitalisasi Gedung KNKT terdapat koreksi nilai sebesar Rp.22.670.000 (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Terkait hal tersebut di atas kiranya dapat dilakukan penyesuaian aset yang telah diserahkan dari KNKT kepada Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan. Sebagai data dukung terlampir kami sampaikan:

1. LHA dari Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal.
2. Bukti Penerimaan Negara.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Hesson
NIP. 19630415 198411 1 001

NO. TRX. : 86827 531474 95202 22/03/2022 12:54:55
NO. REK. : CASH
JUMLAH : 22.670.000
0070 - KCU HARMONI

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian Keuangan
BNI

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 22/03/22 12:54:55	NTB	: 000000531474
Tanggal Buku	: 22/03/22	NTPN	: 51D8C7QLU69IT7M8
Kode Cabang Bank	: 70	STAN	: 304557
	KCU HARMONI		

Data Setoran :

Kode Billing	: 820220322815688
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA KANTOR KNKT
Kementerian / Lembaga	: 022
Unit Eselon I	: 01
Satuan Kerja	: 901274
Jumlah Setoran	: 22.670.000,00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi

PAID
22 MAR 2022
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CAPEM P.G.N.
BNI

Scanned with CamScanner

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820221003599081
Tanggal Billing	:	03-10-2022 08:09:54
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-10-2022 08:09:54
Tanggal Bayar	:	03-10-2022 08:15:45
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***288752*** - SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Total Disetor	:	30.781.000 (IDR)
Terbilang	:	*Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000057039**
NTPN	:	**89DC61JNFCT5A379**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	30.781.000 (IDR)
Keterangan	:	HBL RL-525/25/2022 28.09.22

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820221003599201
Tanggal Billing	:	03-10-2022 08:11:40
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-10-2022 08:11:40
Tanggal Bayar	:	03-10-2022 08:15:46
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***015*** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	:	***09*** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	:	***537721*** - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	:	615.620 (IDR)
Terbilang	:	*Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000057815**
NTPN	:	**653BF1JNFCT5A3B1**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	:	425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	:	615.620 (IDR)
Keterangan	:	RL-525/25/2022

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220317442817
Tanggal Billing	:	17-03-2022 20:02:32
Tanggal Kedaluwarsa	:	24-03-2022 20:02:32
Tanggal Bayar	:	17-03-2022 20:22:08
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***288752*** - SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Total Disetor	:	37.777.777 (IDR)
Terbilang	:	*Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000375811**
NTPN	:	**FF2D56U8EBN1C8O1**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	37.777.777 (IDR)
Keterangan	:	HBL RL-139/25/2022 10.03.22 Lelang Inventaris

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220317443167
Tanggal Billing	:	17-03-2022 20:16:55
Tanggal Kedaluwarsa	:	24-03-2022 20:16:55
Tanggal Bayar	:	17-03-2022 20:22:07
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***015*** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	:	***09*** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	:	***537721*** - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	:	755.556 (IDR)
Terbilang	:	*Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000375394**
NTPN	:	**C43436U8EBN1C92V**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	:	425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	:	755.556 (IDR)
Keterangan	:	RL-139/25/2022

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing	:	820221221581286
Tanggal Billing	:	21-12-2022 16:26:24
Tanggal Kedaluwarsa	:	28-12-2022 16:26:24
Tanggal Bayar	:	22-12-2022 14:18:45
Kelompok PNBP	:	Umum
Mata Uang	:	IDR
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	:	10.000.000 (IDR)
Terbilang	:	Sepuluh Juta (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000740417**
NTPN	:	**113D161QUHVJ7CF6**

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	10.000.000	pengembalian TAYL PT AZEVEDOPRATMA CONSULTANTS (Temuan BPK Tahun 2019)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing	:	820220711574689
Tanggal Billing	:	11-07-2022 10:21:29
Tanggal Kedaluwarsa	:	18-07-2022 10:21:29
Tanggal Bayar	:	11-07-2022 10:53:20
Kelompok PNBP	:	Umum
Mata Uang	:	IDR
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	:	784.320 (IDR)
Terbilang	:	Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000114266**
NTPN	:	**1CF448N3E17I2751**

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	784.320	Pengembalian TAYL Studi 3TP Tahun 2021

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing	:	820221219279412
Tanggal Billing	:	19-12-2022 16:16:17
Tanggal Kedaluwarsa	:	26-12-2022 16:16:17
Tanggal Bayar	:	22-12-2022 13:39:39
Kelompok PNBP	:	Umum
Mata Uang	:	IDR
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	:	10.000.000 (IDR)
Terbilang	:	Sepuluh Juta (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000062985931**
NTPN	:	**35BF62G4V7LVD4HK**

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	10.000.000	pengembalian belanja TAYL PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (temuan BPK Tahun 2019)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing	:	820220715139178
Tanggal Billing	:	15-07-2022 10:28:36
Tanggal Kedaluwarsa	:	22-07-2022 10:28:36
Tanggal Bayar	:	15-07-2022 10:52:10
Kelompok PNBP	:	Umum
Mata Uang	:	IDR
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	:	*Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
Total Disetor	:	10.000.000 (IDR)
Terbilang	:	Sepuluh Juta (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000058077906**
NTPN	:	**9D4927QLU6L9203A**

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	10.000.000	pengembalian belanja TAYL .PT AZEVEDOPRATAMA (TEMUAN BPK TAHUN 2019)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing	:	820220715139474
Tanggal Billing	:	15-07-2022 10:30:42
Tanggal Kedaluwarsa	:	22-07-2022 10:30:42
Tanggal Bayar	:	19-07-2022 10:17:52
Kelompok PNBP	:	Umum
Mata Uang	:	IDR
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	:	*Overbooking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
Total Disetor	:	10.000.000 (IDR)
Terbilang	:	Sepuluh Juta (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000058149390**
NTPN	:	**4CB0048VUSBNE0CI**

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	10.000.000	pengembalian belanja TAYL .PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (TEMUAN BPK TAHUN 2019)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing	:	820220512504084
Tanggal Billing	:	12-05-2022 19:59:32
Tanggal Kedaluwarsa	:	19-05-2022 19:59:32
Tanggal Bayar	:	13-05-2022 17:06:11
Kelompok PNBP	:	Umum
Mata Uang	:	IDR
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	:	2.040.000 (IDR)
Terbilang	:	Dua Juta Empat Puluh Ribu (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000275372**
NTPN	:	**DB26C48VUS5M628K**

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	2.040.000	pengembalian belanja tayl

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing	:	820220512421100
Tanggal Billing	:	12-05-2022 11:08:38
Tanggal Kedaluwarsa	:	19-05-2022 11:08:38
Tanggal Bayar	:	13-05-2022 14:33:30
Kelompok PNBP	:	Umum
Mata Uang	:	IDR
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	:	87.166.145 (IDR)
Terbilang	:	Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Lima (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000478488**
NTPN	:	**ECA4A0N9VHS4FH7C**

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	87.166.145	pengembalian belanja TAYL. Studi 3TP Tahun 2021

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220707270197
Tanggal Billing	:	07-07-2022 10:28:00
Tanggal Kedaluwarsa	:	14-07-2022 10:28:00
Tanggal Bayar	:	07-07-2022 11:09:18
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***288944*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
Total Disetor	:	206.125.997 (IDR)
Terbilang	:	*Dua Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000117409**
NTPN	:	**AB2C76U8EC2L4RHL**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	206.125.997 (IDR)
Keterangan	:	HBL RL-350/25/2022 06.07.22

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220707270687
Tanggal Billing	:	07-07-2022 10:29:09
Tanggal Kedaluwarsa	:	14-07-2022 10:29:09
Tanggal Bayar	:	07-07-2022 11:09:18
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***015*** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	:	***09*** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	:	***537721*** - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	:	4.122.520 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000117393**
NTPN	:	**2B7986U8EC2L4S0V**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	:	425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	:	4.122.520 (IDR)
Keterangan	:	RL-350/25/2022

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220801757418
Tanggal Billing	:	01-08-2022 07:01:51
Tanggal Kedaluwarsa	:	08-08-2022 07:01:51
Tanggal Bayar	:	01-08-2022 07:04:37
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***288951*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA
Total Disetor	:	11.705.000 (IDR)
Terbilang	:	*Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000264650**
NTPN	:	**488317QLU6NRLC7A**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	11.705.000 (IDR)
Keterangan	:	HBL RL-388/25/2022 27.07.22

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220517866447
Tanggal Billing	:	17-05-2022 10:25:15
Tanggal Kedaluwarsa	:	24-05-2022 10:25:15
Tanggal Bayar	:	18-05-2022 11:58:49
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Pengeluaran Puslitbang Transportas Udara
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***288951*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA
Total Disetor	:	83.700.000 (IDR)
Terbilang	:	*Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000376809**
NTPN	:	**00D516U8EBT0GMUF**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	83.700.000 (IDR)
Keterangan	:	Kelebihan Pembayaran Tenaga Ahli untuk Kajian Peraturan Pengoperasian Drone di Area Perkotaan yang dikerjasamakan dengan Djokosoetono Research Center FH, UI

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 583 Tahun 2022
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pengguna Barang perlu melakukan penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara dengan ditindaklanjuti pemindahtanganan melalui penjualan dilakukan dengan pertimbangan Barang Milik Negara sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepad Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor SK-BLT 09 TAHUN 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Satker di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta lampiran Daftar Barang yang akan dihapus Nomor: BA-BLTU 1 Tahun 2022;
3. Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.402/2/24 PHB 2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara;
4. Salinan Risalah Lelang Nomor 388/25/2022 tanggal 27 Juli 2022 pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara yang telah ditandatangani oleh Pejabat Lelang berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN.

PERTAMA : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai nilai perolehan sebesar Rp631.712.550 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan nilai penjualan sebesar Rp11.705.000 (sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

KETIGA : Terhadap penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, apabila terdapat Barang Milik Negara yang hilang/tidak diketemukan fisiknya, dapat dikenakan ganti rugi apabila di kemudian hari dapat dibuktikan lain yaitu adanya unsur kesengajaan/ kesalahan/kelalaian dari bendaharawan/pengurus barang dalam proses penghapusan Barang Milik Negara dimaksud.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib menghapus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dari catatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

KELIMA : Kuasa Pengguna Barang wajib melaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan Sekretaris Jenderal c.q. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEEMPAT, paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : Agustus 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI UDARA

Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M.
NIP 196811232016111001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 583 Tahun 2022
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUSKAN PENGGUNAANYA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Harga Limit	Penjualan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1 (satu) paket peralatan dan mesin terdiri atas :									
1	3100102001	19	P.C Unit	ACER Aspire M 5711	2009	14.993.000	50.000		Laku/Terjual
2	3100102001	20	P.C Unit	ACER Aspire M 5711	2009	14.993.000	50.000		Laku/Terjual
3	3100102001	24	P.C Unit	HP Touchmart 300-1028 d PC	2010	12.595.000	50.000		Laku/Terjual
4	3100102001	25	P.C Unit	HP Touchmart 300-1028 d PC	2010	12.595.000	50.000		Laku/Terjual
5	3100102001	27	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	12.996.500	50.000		Laku/Terjual
6	3100102001	28	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	12.996.500	50.000		Laku/Terjual
7	3100102001	30	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	12.996.500	50.000		Laku/Terjual
8	3100102001	32	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	12.996.500	50.000		Laku/Terjual
9	3100102001	33	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.380	50.000		Laku/Terjual
10	3100102001	35	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.380	50.000		Laku/Terjual
11	3100102001	36	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.380	50.000		Laku/Terjual
12	3100102001	39	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.380	50.000		Laku/Terjual
13	3100102001	41	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.380	50.000		Laku/Terjual
14	3100102001	43	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.380	50.000		Laku/Terjual
15	3100102001	44	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.380	50.000		Laku/Terjual
16	3100102001	45	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	14.930.440	50.000		Laku/Terjual
17	3100102001	46	P.C Unit	Lenovo	2014	13.915.000	50.000		Laku/Terjual
18	3100102001	54	P.C Unit	Lenovo	2014	13.915.000	50.000		Laku/Terjual
19	3100102001	55	P.C Unit	Lenovo	2014	13.915.000	50.000		Laku/Terjual
20	3050105007	1	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	5.637.500	15.000		Laku/Terjual
21	3050105007	2	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	5.637.500	15.000		Laku/Terjual
22	3050105007	3	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	5.637.500	15.000		Laku/Terjual
23	3050105007	4	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	5.637.500	15.000		Laku/Terjual
24	3100203003	7	Printer	HP	2006	4.400.000	30.000		Laku/Terjual
25	3100203003	8	Printer	HP	2007	3.960.000	30.000		Laku/Terjual
26	3100203003	12	Printer	HP Laserjet	2008	2.970.000	30.000		Laku/Terjual
27	3100203003	15	Printer	HP Laserjet P 1006	2009	2.488.750	30.000		Laku/Terjual
28	3100203003	17	Printer	HP LaserJet CM 1017 MFP	2010	7.122.500	30.000		Laku/Terjual
29	3100203003	19	Printer	HP Deskjet 1050 Scan Print	2011	995.500	35.000		Laku/Terjual
30	3100203003	22	Printer	Canon Image Class MF 3010	2012	2.997.500	35.000		Laku/Terjual
31	3100203003	29	Printer	HP Colour Laserjet CP5225	2014	21.450.000	40.000		Laku/Terjual
32	3100203003	30	Printer	HP Laserjet M401N	2014	5.170.000	35.000		Laku/Terjual
33	3100203003	38	Printer	HP Pro X476DW	2016	7.810.000	35.000		Laku/Terjual
34	3050105038	1	Laser Pointer	Logitech Laser R400	2015	550.000	5.000		Laku/Terjual

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Harga Limit	Penjualan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	3050105038	2	Laser Pointer	Logitech Laser R401	2015	550.000	5.000		Laku/Terjual
36	3050105038	5	Laser Pointer	Logitech Laser R404	2015	550.000	5.000		Laku/Terjual
37	3050201008	3	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
38	3050201008	4	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
39	3050201008	5	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
40	3050201008	6	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
41	3050201008	7	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
42	3050201008	8	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
43	3050201008	9	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
44	3050201008	10	Meja Rapat		2013	7.626.025	15.000		Laku/Terjual
45	3050201003	131	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
46	3050201003	132	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
47	3050201003	133	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
48	3050201003	134	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
49	3050201003	135	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
50	3050201003	136	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
51	3050201003	137	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
52	3050201003	138	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
53	3050201003	139	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
54	3050201003	140	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
55	3050201003	141	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
56	3050201003	142	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
57	3050201003	143	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
58	3050201003	144	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
59	3050201003	145	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
60	3050201003	146	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
61	3050201003	147	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
62	3050201003	148	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
63	3050201003	149	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
64	3050201003	150	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
65	3050201003	151	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
66	3050201003	152	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
67	3050201003	153	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
68	3050201003	154	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
69	3050201003	155	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
70	3050201003	156	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
71	3050201003	157	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
72	3050201003	158	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
73	3050201003	159	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
74	3050201003	160	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
75	3050201003	161	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
76	3050201003	162	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
77	3050201003	163	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
78	3050201003	164	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
79	3050201003	165	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
80	3050201003	166	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
81	3050201003	167	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Harga Limit	Penjualan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
82	3050201003	168	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
83	3050201003	169	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
84	3050201003	170	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
85	3050201003	171	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	2.860.000	20.000		Laku/Terjual
86	3050201003	172	Kursi Besi/Metal	Leather	2013	6.050.000	20.000		Laku/Terjual
87	3050201003	173	Kursi Besi/Metal	Leather	2013	6.050.000	20.000		Laku/Terjual
88	3050206046	2	Handycam	Sony HDR P J660	2014	14.300.000	40.000		Laku/Terjual
89	3050206046	3	Handycam	Sony VDR-X1000V	2015	9.900.000	20.000		Laku/Terjual
90	3060201003	2	Pesawat Telephone	Panasonic	2013	594.000	5.000		Laku/Terjual
91	3060201003	4	Pesawat Telephone	Panasonic	2013	594.000	5.000		Laku/Terjual
92	3100102002	13	Laptop	Sony VAIO	2014	16.010.500	50.000		Laku/Terjual
93	3100102002	14	Laptop	Sony VAIO	2014	16.010.500	50.000		Laku/Terjual
94	3100102002	17	Laptop	Sony VAIO	2014	16.010.500	50.000		Laku/Terjual
95	3100102002	18	Laptop	Sony VAIO	2014	16.010.500	50.000		Laku/Terjual
TOTAL						**631.712.550**	**2.605.000**	**11.705.000**	

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
Kepala
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Transportasi Udara

Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M.
NIP. 196811232016111001

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1271 Tahun 2022
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pengguna Barang perlu melakukan penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara dengan ditindaklanjuti pemindahtanganan melalui penjualan dilakukan dengan pertimbangan Barang Milik Negara sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepad Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Nomor SK-BKT 77 TAHUN 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Satker di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi serta lampiran Daftar Barang yang akan dihapus Nomor: BA-PKPTIM 9 Tahun 2022;
3. Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.402/21/6 PHB 2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) pada Pusat Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN.

PERTAMA : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Kebijakan Transportasi dan Integrasi Moda dengan Tindak Lanjut Pemusnahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai nilai perolehan sebesar Rp55.004.400,- (lima puluh lima juta empat ribu empat ratus rupiah) berupa Aset Tak Berwujud sejumlah 4 (empat) unit Software.

KETIGA : Terhadap penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, apabila terdapat Barang Milik Negara yang hilang/tidak diketemukan fisiknya, dapat dikenakan ganti rugi apabila di kemudian hari dapat dibuktikan lain yaitu adanya unsur kesengajaan/ kesalahan/kelalaian dari bendaharawan/pengurus barang dalam proses penghapusan Barang Milik Negara dimaksud.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib menghapus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dari catatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

KELIMA : Kuasa Pengguna Barang wajib melaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan Sekretaris Jenderal c.q. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEEMPAT, paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA
TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M.
NIP 196811232016111001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 1271 Tahun 2022
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUSKAN PENGGUNAANYA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku pada SAKTI	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	8.01.01.01.001	2	Software Komputer	Face Recognition SDK (VeriLook 9.0 Extended SDK)	2016	Rp 25,852,200	0	Pemusnahan
2	8.01.01.01.001	3	Software Komputer	Additional Licence FaceRecog : VeriLook FaceMatcher + Face Extractor	2016	Rp 1,650,000	0	Pemusnahan
3	8.01.01.01.001	4	Software Komputer	Iris Recognition SDK VeriEye 9.0 Extended SDK	2016	Rp 25,852,200	0	Pemusnahan
4	8.01.01.01.001	5	Software Komputer	Additional Licence : VeriEyeIris Matcher + Iris Extractor	2016	Rp 1,650,000	0	Pemusnahan
TOTAL						**55,004,400**	**0**	

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
Kepala
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi
dan Integrasi Moda

Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M.
NIP. 196811232016111001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PL. 404/21/6 PHB 2022 Jakarta, 26 Desember 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Yth. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Nomor PL.402/1/04/PKPTIM/2022 tanggal 24 November 2022 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pemusnahan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sejumlah 4 (empat) unit berupa *software* dengan total nilai perolehan sebesar Rp55.004.400,- (lima puluh lima juta empat ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemusnahan Barang Milik Negara tersebut tidak mengganggu tugas operasional UPT/Satker Saudara;
2. Pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan ini dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara;
3. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara ditandatangani;
4. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan;
5. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dimusnahkan tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang; dan

6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R
NIP. 196611111995031001

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal, Kemenhub;
3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu;
4. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Setjen, Kemenhub;
5. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta;
7. Kepala KPKNL Jakarta I.

LAMPIRAN
SURAT MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PL. 404/21/6 PHB 2022
TANGGAL 26 Desember 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIMUSNAHKAN
PADA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)		Kondisi
							Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
1	8.01.01.01.001	2	Software Komputer	face Recognition SDK (Verilook 9.0 Extended SDK)	2016	1	25.852.200	25.852.200	Rusak Berat
2	8.01.01.01.001	3	Software Komputer	Additional License FaceRecog : Verilook FaceMatcher + Face Extractor	2016	1	1.650.000	1.650.000	Rusak Berat
3	8.01.01.01.001	4	Software Komputer	Iris Recognition SDK VeriEye 9.0 Extended SDK	2016	1	25.852.200	25.852.200	Rusak Berat
4	8.01.01.01.001	5	Software Komputer	Additional License : VeriEyeIris Matcher + Iris Extractor	2016	1	1.650.000	1.650.000	Rusak Berat
Total						4	55.004.400	55.004.400	

a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R
NIP. 196611111995031001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PL. 405/10/8 PHB 2022 Jakarta, 26 Desember 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Yth. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Nomor PL.402/1/03/PKPTIM-2022 tanggal 24 November 2022 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin sejumlah 45 (empat puluh lima) unit dengan total nilai perolehan sebesar Rp391.033.500,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang kondisinya rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan Barang Milik Negara tersebut tidak mengganggu tugas operasional UPT/Satker Saudara dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual;
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penjualan Barang Milik Negara secara lelang;
3. Pengajuan permohonan atas pelaksana lelang secara lengkap paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan;
4. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara dimaksud agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dengan nilai limit sebesar Rp1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Pada Satker DI Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 Nomor BA-PKPTIM 8 tanggal 24 November 2022 dan hasil penjualan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara;

5. Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang;
6. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani;
7. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara dan Keputusan Penghapusan;
8. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R
NIP. 196611111995031001

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal, Kemenhub;
3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu;
4. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Setjen, Kemenhub;
5. Kepala KPKNL Jakarta I.

LAMPIRAN SURAT MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PL. 405/10/8 PHB 2022
TANGGAL : 26 Desember 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL
PADA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)		Nilai Taksiran (Rp)		Kondisi
							Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	3.05.01.05.007	6	CCTV-Camera Control Television System	Camera Hikvision Model : D5-2CD2620F-I(S)	2016	1	7.920.000	7.920.000	20.000	20.000	Rusak Berat
2	3.05.01.05.007	7	CCTV-Camera Control Television System	Camera Hikvision Model : D5-2CD2620F-I(S)	2016	1	7.920.000	7.920.000	20.000	20.000	Rusak Berat
3	3.09.04.05.011	1	Fingerprint Livescanner	Fingerprint scanner, Nitgen C1	2016	1	8.030.000	8.030.000	15.000	15.000	Rusak Berat
4	3.09.04.05.011	2	Fingerprint Livescanner	Fingerprint scanner, Nitgen C1	2016	1	8.030.000	8.030.000	15.000	15.000	Rusak Berat
5	3.09.04.05.011	3	Fingerprint Livescanner	Fingerprint SDK : VeriFinger 9.0 Extended SDK	2016	1	25.852.200	25.852.200	50.000	50.000	Rusak Berat
6	3.09.04.05.011	4	Fingerprint Livescanner	Additional Licence Verifinger Fingerprint Matcher + Fingerprint Extractor	2016	1	1.650.000	1.650.000	10.000	10.000	Rusak Berat
7	3.05.01.05.057	1	Pintu Elektrik	Iris Scanner MK 2121U	2016	1	9.515.000	9.515.000	15.000	15.000	Rusak Berat
8	3.05.01.05.057	2	Pintu Elektrik	Iris Scanner MK 2121U	2016	1	9.515.000	9.515.000	15.000	15.000	Rusak Berat
9	3.05.01.05.057	3	Pintu Elektrik	Tunstile gate, Scanmatic SM889	2016	1	31.790.000	31.790.000	75.000	75.000	Rusak Berat
10	3.05.01.05.057	4	Pintu Elektrik	Gate controller	2016	1	1.741.300	1.741.300	10.000	10.000	Rusak Berat
11	3.05.01.05.057	5	Pintu Elektrik	Tunrstile gate, Scanmatic SM889	2016	1	26.400.000	26.400.000	75.000	75.000	Rusak Berat
12	3.05.01.05.057	6	Pintu Elektrik	Gate controller	2016	1	1.100.000	1.100.000	10.000	10.000	Rusak Berat
13	3.05.01.05.091	1	RFID Tag	RFID card Proximity 12K	2016	1	2.970.000	2.970.000	15.000	15.000	Rusak Berat
14	3.05.01.05.092	1	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
15	3.05.01.05.092	2	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
16	3.05.01.05.092	3	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
17	3.05.01.05.092	4	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
18	3.05.01.05.092	5	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
19	3.05.01.05.092	6	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
20	3.05.01.05.092	7	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
21	3.05.01.05.092	8	RFID Pad	RFID reader Axopos r 10	2016	1	1.430.000	1.430.000	5.000	5.000	Rusak Berat
22	3.08.01.56.081	1	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
23	3.08.01.56.081	2	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
24	3.08.01.56.081	3	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
25	3.08.01.56.081	4	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
26	3.08.01.56.081	5	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
27	3.08.01.56.081	6	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
28	3.08.01.56.081	7	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
29	3.08.01.56.081	8	Meja Kerja	Meja Lipat	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
30	3.10.01.02.001	74	P.C Unit	PC Dell Optiplex 7040 MT	2016	1	21.890.000	21.890.000	50.000	50.000	Rusak Berat
31	3.10.01.02.001	75	P.C Unit	PC Dell Optiplex 7040 MT	2016	1	21.890.000	21.890.000	50.000	50.000	Rusak Berat
32	3.10.01.02.001	76	P.C Unit	PC Dell Optiplex 7040 MT	2016	1	21.890.000	21.890.000	50.000	50.000	Rusak Berat
33	3.10.01.02.001	77	P.C Unit	PC Dell Optiplex 7040 MT	2016	1	21.890.000	21.890.000	50.000	50.000	Rusak Berat
34	3.10.01.02.001	78	P.C Unit	PC Dell Optiplex 3040 MT	2016	1	18.480.000	18.480.000	50.000	50.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)		Nilai Taksiran (Rp)		Kondisi
							Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	3.10.01.02.001	79	P.C Unit	PC Dell Optiplex 3040 MT	2016	1	18.480.000	18.480.000	50.000	50.000	Rusak Berat
36	3.10.01.02.001	80	P.C Unit	PC Dell Optiplex 3040 MT	2016	1	18.480.000	18.480.000	50.000	50.000	Rusak Berat
37	3.10.01.02.001	81	P.C Unit	PC Dell Optiplex 3040 MT	2016	1	18.480.000	18.480.000	50.000	50.000	Rusak Berat
38	3.08.01.11.137	1	Tripod	Tripod (iris + face)	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
39	3.08.01.11.137	2	Tripod	Tripod (iris + face)	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
40	3.08.01.11.137	3	Tripod	Tripod (iris + face)	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
41	3.08.01.11.137	4	Tripod	Tripod (iris + face)	2016	1	2.200.000	2.200.000	10.000	10.000	Rusak Berat
42	3.10.01.02.008	4	Ultra Mobile P.C	iPAD Apple Air 128 GB	2015	1	12.320.000	12.320.000	25.000	25.000	Rusak Berat
43	3.10.01.02.008	5	Ultra Mobile P.C	iPAD Apple Air 128 GB	2015	1	12.320.000	12.320.000	25.000	25.000	Rusak Berat
44	3.10.01.02.008	6	Ultra Mobile P.C	iPAD Apple Air 128 GB	2015	1	12.320.000	12.320.000	25.000	25.000	Rusak Berat
45	3.10.01.02.008	7	Ultra Mobile P.C	iPAD Apple Air 128 GB	2015	1	12.320.000	12.320.000	25.000	25.000	Rusak Berat
Total						45	391.033.500	391.033.500	1.005.000	1.005.000	

a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R
NIP. 196611111995031001

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220103398799
Tanggal Billing	:	03-01-2022 11:10:56
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-01-2022 11:10:56
Tanggal Bayar	:	06-01-2022 13:28:55
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	110 (IDR)
Terbilang	:	*Seratus Sepuluh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000387703**
NTPN	:	**03B1B8N3E0LE25CF**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	110 (IDR)
Keterangan	:	Evaluasi Sistem Persinyalan Perkeretaapian yang Mengintegrasikan Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220103400038
Tanggal Billing	:	03-01-2022 11:08:59
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-01-2022 11:08:59
Tanggal Bayar	:	06-01-2022 13:28:53
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	200.937 (IDR)
Terbilang	:	*Dua Ratus Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000386713**
NTPN	:	**80BFF7QLU631L6J6**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	200.937 (IDR)
Keterangan	:	Penyusunan Standar Teknologi Sarana Angkutan Umum Autonomus Berbasis Energi Listrik di Wilayah IKN

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220103400750
Tanggal Billing	:	03-01-2022 11:12:44
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-01-2022 11:12:44
Tanggal Bayar	:	06-01-2022 13:28:54
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	25.905.125 (IDR)
Terbilang	:	*Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000387127**
NTPN	:	**2B5260N9VHFUD79E**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	25.905.125 (IDR)
Keterangan	:	Perumusan Bahan Kebijakan Mekanisem Buy The Service Penyelenggaraan Angkutan Umum

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220103401150
Tanggal Billing	:	03-01-2022 11:13:46
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-01-2022 11:13:46
Tanggal Bayar	:	06-01-2022 13:28:56
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	35.721.270 (IDR)
Terbilang	:	*Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000388181**
NTPN	:	**B58B60N9VHFUD7LU**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	35.721.270 (IDR)
Keterangan	:	Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Angkutan Muatan Barang dan Penumpang

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220103401460
Tanggal Billing	:	03-01-2022 11:15:46
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-01-2022 11:15:46
Tanggal Bayar	:	06-01-2022 13:28:55
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	90.268.302 (IDR)
Terbilang	:	*Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000387260**
NTPN	:	**1191C0N9VHFUD7VK**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	90.268.302 (IDR)
Keterangan	:	Kaji Ulang Tata Kelola Organisasi Pengelola Terminal Tipe A

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220103401716
Tanggal Billing	:	03-01-2022 11:17:02
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-01-2022 11:17:02
Tanggal Bayar	:	06-01-2022 13:28:56
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	313.652 (IDR)
Terbilang	:	*Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000388119**
NTPN	:	**4BF4961QUGU8R87K**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	313.652 (IDR)
Keterangan	:	Dampak Kebijakan dan Strategi Implementasi Penerbitan ODOL

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220103401803
Tanggal Billing	:	03-01-2022 11:17:55
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-01-2022 11:17:55
Tanggal Bayar	:	06-01-2022 13:28:55
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	198.122.378 (IDR)
Terbilang	:	*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000387376**
NTPN	:	**DA6013CIF173K8AB**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	198.122.378 (IDR)
Keterangan	:	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2021

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220517880975
Tanggal Billing	:	17-05-2022 11:24:45
Tanggal Kedaluwarsa	:	24-05-2022 11:24:45
Tanggal Bayar	:	23-05-2022 11:07:07
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LISTIFADAH
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***414267*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	78.760.000 (IDR)
Terbilang	:	*Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000005481**
NTPN	:	**1C78855DEMO7N54F**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	78.760.000 (IDR)
Keterangan	:	Penerimaan Jasa Lainnya

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220621386833
Tanggal Billing	:	21-06-2022 09:22:54
Tanggal Kedaluwarsa	:	28-06-2022 09:22:54
Tanggal Bayar	:	21-06-2022 09:36:22
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***414267*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Total Disetor	:	22.612.000 (IDR)
Terbilang	:	*Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000790502**
NTPN	:	**ADEB33CIF1MHJT2H**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	22.612.000 (IDR)
Keterangan	:	HBL RL-306/25/2022 15.06.22

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820221219191737
Tanggal Billing	:	19-12-2022 10:27:11
Tanggal Kedaluwarsa	:	26-12-2022 10:27:11
Tanggal Bayar	:	19-12-2022 10:32:45
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	:	***414267*** - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
Total Disetor	:	12.222.229 (IDR)
Terbilang	:	*Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000358573**
NTPN	:	**65C696U8ECHTBETP**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	12.222.229 (IDR)
Keterangan	:	HBL RL-704/25/2022 13.12.22

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	:	PL.402/2/24 PHB 2022	Jakarta, 14 Juni 2022
Klasifikasi	:	Biasa	
Lampiran	:	Satu berkas	
Hal	:	Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	

Yth. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara

Dalam rangka menindaklanjuti surat Saudara Nomor PL.402/1/1-BLTU-2022 tanggal 17 Maret 2022 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin sejumlah 95 (sembilan puluh lima) unit dengan total nilai perolehan sebesar Rp631.712.550,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang kondisinya rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan Barang Milik Negara tersebut tidak mengganggu tugas operasional UPT/Satker Saudara dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual;
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penjualan Barang Milik Negara secara lelang;
3. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan;
4. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara dimaksud agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dengan total nilai limit sebesar Rp2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Satker di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2022 Nomor BA-BLTU 1 Tahun 2022

tanggal 17 Maret 2022 dan hasil penjualan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara;

5. Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang;
6. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani;
7. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara dan Keputusan Penghapusan;
8. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R.
NIP. 196611111995031001

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal, Kemenhub;
3. Direktur Barang Milik Negara, DJKN, Kemenkeu;
4. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Setjen, Kemenhub;
5. Sekretaris Badan Litbang Perhubungan;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta;
7. Kepala KPKNL Jakarta I.

LAMPIRAN SURAT MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PL.402/2/24 PHB 2022
TANGGAL : 14 Juni 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)		Nilai Taksiran (Rp)		Kondisi
							Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	3100102001	19	P.C Unit	ACER Aspire M 5711	2009	1	14.993.000	14.993.000	50.000	50.000	Rusak Berat
2	3100102001	20	P.C Unit	ACER Aspire M 5711	2009	1	14.993.000	14.993.000	50.000	50.000	Rusak Berat
3	3100102001	24	P.C Unit	HP Touchmart 300-1028 d PC	2010	1	12.595.000	12.595.000	50.000	50.000	Rusak Berat
4	3100102001	25	P.C Unit	HP Touchmart 300-1028 d PC	2010	1	12.595.000	12.595.000	50.000	50.000	Rusak Berat
5	3100102001	27	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	1	12.996.500	12.996.500	50.000	50.000	Rusak Berat
6	3100102001	28	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	1	12.996.500	12.996.500	50.000	50.000	Rusak Berat
7	3100102001	30	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	1	12.996.500	12.996.500	50.000	50.000	Rusak Berat
8	3100102001	32	P.C Unit	Lenovo K 330B 628	2012	1	12.996.500	12.996.500	50.000	50.000	Rusak Berat
9	3100102001	33	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.380	14.930.380	50.000	50.000	Rusak Berat
10	3100102001	35	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.380	14.930.380	50.000	50.000	Rusak Berat
11	3100102001	36	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.380	14.930.380	50.000	50.000	Rusak Berat
12	3100102001	39	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.380	14.930.380	50.000	50.000	Rusak Berat
13	3100102001	41	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.380	14.930.380	50.000	50.000	Rusak Berat
14	3100102001	43	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.380	14.930.380	50.000	50.000	Rusak Berat
15	3100102001	44	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.380	14.930.380	50.000	50.000	Rusak Berat
16	3100102001	45	P.C Unit	Dell Optiplex 3010MT	2013	1	14.930.440	14.930.440	50.000	50.000	Rusak Berat
17	3100102001	46	P.C Unit	Lenovo	2014	1	13.915.000	13.915.000	50.000	50.000	Rusak Berat
18	3100102001	54	P.C Unit	Lenovo	2014	1	13.915.000	13.915.000	50.000	50.000	Rusak Berat
19	3100102001	55	P.C Unit	Lenovo	2014	1	13.915.000	13.915.000	50.000	50.000	Rusak Berat
20	3050105007	1	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	1	5.637.500	5.637.500	15.000	15.000	Rusak Berat
21	3050105007	2	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	1	5.637.500	5.637.500	15.000	15.000	Rusak Berat
22	3050105007	3	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	1	5.637.500	5.637.500	15.000	15.000	Rusak Berat
23	3050105007	4	CCTV-Camera Control Television System	AVTECH Indonesia	2013	1	5.637.500	5.637.500	15.000	15.000	Rusak Berat
24	3100203003	7	Printer	HP	2006	1	4.400.000	4.400.000	30.000	30.000	Rusak Berat
25	3100203003	8	Printer	HP	2007	1	3.960.000	3.960.000	30.000	30.000	Rusak Berat
26	3100203003	12	Printer	HP Laserjet	2008	1	2.970.000	2.970.000	30.000	30.000	Rusak Berat
27	3100203003	15	Printer	HP Laserjet P 1006	2009	1	2.488.750	2.488.750	30.000	30.000	Rusak Berat
28	3100203003	17	Printer	HP LaserJet CM 1017 MFP	2010	1	7.122.500	7.122.500	30.000	30.000	Rusak Berat
29	3100203003	19	Printer	HP Deskjet 1050 Scan Print	2011	1	995.500	995.500	35.000	35.000	Rusak Berat
30	3100203003	22	Printer	Canon Image Class MF 3010	2012	1	2.997.500	2.997.500	35.000	35.000	Rusak Berat
31	3100203003	29	Printer	HP Colour Laserjet CP5225	2014	1	21.450.000	21.450.000	40.000	40.000	Rusak Berat
32	3100203003	30	Printer	HP Laserjet M401N	2014	1	5.170.000	5.170.000	35.000	35.000	Rusak Berat
33	3100203003	38	Printer	HP Pro X476DW	2016	1	7.810.000	7.810.000	35.000	35.000	Rusak Berat
34	3050105038	1	Laser Pointer	Logitech Laser R400	2015	1	550.000	550.000	5.000	5.000	Rusak Berat
35	3050105038	2	Laser Pointer	Logitech Laser R401	2015	1	550.000	550.000	5.000	5.000	Rusak Berat
36	3050105038	5	Laser Pointer	Logitech Laser R404	2015	1	550.000	550.000	5.000	5.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)		Nilai Taksiran (Rp)		Kondisi
							Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	3050201008	3	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
38	3050201008	4	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
39	3050201008	5	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
40	3050201008	6	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
41	3050201008	7	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
42	3050201008	8	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
43	3050201008	9	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
44	3050201008	10	Meja Rapat		2013	1	7.626.025	7.626.025	15.000	15.000	Rusak Berat
45	3050201003	131	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
46	3050201003	132	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
47	3050201003	133	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
48	3050201003	134	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
49	3050201003	135	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
50	3050201003	136	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
51	3050201003	137	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
52	3050201003	138	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
53	3050201003	139	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
54	3050201003	140	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
55	3050201003	141	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
56	3050201003	142	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
57	3050201003	143	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
58	3050201003	144	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
59	3050201003	145	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
60	3050201003	146	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
61	3050201003	147	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
62	3050201003	148	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
63	3050201003	149	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
64	3050201003	150	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
65	3050201003	151	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
66	3050201003	152	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
67	3050201003	153	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
68	3050201003	154	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
69	3050201003	155	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
70	3050201003	156	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
71	3050201003	157	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
72	3050201003	158	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
73	3050201003	159	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
74	3050201003	160	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
75	3050201003	161	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
76	3050201003	162	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
77	3050201003	163	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
78	3050201003	164	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
79	3050201003	165	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
80	3050201003	166	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)		Nilai Taksiran (Rp)		Kondisi
							Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
81	3050201003	167	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
82	3050201003	168	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
83	3050201003	169	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
84	3050201003	170	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
85	3050201003	171	Kursi Besi/Metal	Oscar	2013	1	2.860.000	2.860.000	20.000	20.000	Rusak Berat
86	3050201003	172	Kursi Besi/Metal	Leather	2013	1	6.050.000	6.050.000	20.000	20.000	Rusak Berat
87	3050201003	173	Kursi Besi/Metal	Leather	2013	1	6.050.000	6.050.000	20.000	20.000	Rusak Berat
88	3050206046	2	Handycam	Sony HDR P J660	2014	1	14.300.000	14.300.000	40.000	40.000	Rusak Berat
89	3050206046	3	Handycam	Sony VDR-X1000V	2015	1	9.900.000	9.900.000	20.000	20.000	Rusak Berat
90	3060201003	2	Pesawat Telephone	Panasonic	2013	1	594.000	594.000	5.000	5.000	Rusak Berat
91	3060201003	4	Pesawat Telephone	Panasonic	2013	1	594.000	594.000	5.000	5.000	Rusak Berat
92	3100102002	13	Laptop	Sony VAIO	2014	1	16.010.500	16.010.500	50.000	50.000	Rusak Berat
93	3100102002	14	Laptop	Sony VAIO	2014	1	16.010.500	16.010.500	50.000	50.000	Rusak Berat
94	3100102002	17	Laptop	Sony VAIO	2014	1	16.010.500	16.010.500	50.000	50.000	Rusak Berat
95	3100102002	18	Laptop	Sony VAIO	2014	1	16.010.500	16.010.500	50.000	50.000	Rusak Berat
Total						95		631.712.550		2.605.000	

a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Novie Riyanto R.
NIP. 196611111995031001

7. LAMPIRAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220513696401
Tanggal Billing	:	13-05-2022 13:19:45
Tanggal Kedaluwarsa	:	20-05-2022 13:19:45
Tanggal Bayar	:	13-05-2022 14:16:49
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Puslitbang Transportasi Antarmoda
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***634171*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA
Total Disetor	:	48.000.000 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Puluh Delapan Juta (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**001690887473**
NTPN	:	**A2EBE1JNFCEI3EKH**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	48.000.000 (IDR)
Keterangan	:	Penerimaan jasa lainnya

Tanggal Cetak : 25/05/2022 09:47:20 WIB ***1/1*** ***SIMPONI***

BANK MANDIRI 13/05/2022 2:17:56 PM
10322 1032258

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANKSAKSI : 72434522051314174746 93
TANGGAL,WAKTU TRANSAKSI : 13/05/2022 2:17:56 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 13/05/2022 14:16:49
TANGGAL BUKU : 17/05/22
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 001690887473
NTPN : A2EBE1JNFCEI3EKH
STAN : 942175
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 820220513696401
NAMA WAJIB BAYAR : PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA
KEMETRIAN / LEMBAGA : 022
UNIT ESELON 1 : 11
SATUAN KERJA : 634171
JUMLAH SETORAN : RP. 48,000,000.00
TERBILANG : EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	48000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 48,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 48,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
10322 1032258 1032211 117 17 13/05/2022 2:17:56 PM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 48,000,000.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 48,000,000.00 CR
BILL REF 72434522051314174746 93
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 820220513696401 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220527886829
Tanggal Billing	:	27-05-2022 10:46:50
Tanggal Kedaluwarsa	:	03-06-2022 10:46:50
Tanggal Bayar	:	-
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	-
Channel Bayar	:	-
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Puslitbang Transportasi Antarmoda
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***634171*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA
Total Disetor	:	99.670.800 (IDR)
Terbilang	:	*Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus (IDR)*
Status	:	Belum Dibayar
NTB	:	-
NTPN	:	-

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	99.670.800 (IDR)
Keterangan	:	Kelebihan Pembayaran Tenaga Ahli untuk Kajian Integrasi Jaringan Prasarana Transportasi dalam rangka Pengembangan Stasiun Manggarai sebagai Central Station (UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan FT UI)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website https://penerimaan-negara.info dan http://bit.ly/infobayarMPNG2.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

Tanggal Cetak : 27/05/2022 10:46:54 WIB ***1/2*** ***SIMPONI***

Yahoo Mail - Transaction Notification : Success https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/12050

Transaction Notification : Success

Dari: BNIDirect@bni.co.id (bnidirect@bni.co.id)

Kepada: idafarida.khonza@yahoo.com

Tanggal: Jumat, 27 Mei 2022 13.41 WIB

BNI

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Bapak/Ibu UP2M TSL FTUI UKK

Terimakasih Anda telah menggunakan BNIDirect.
Berikut adalah informasi transaksi yang telah Anda lakukan melalui BNIDirect:

Tanggal/Jam	: 27-May-2022 13:39:48
No. Referensi	: 20220527110753279496
Tipe Transaksi	: Bill Payment
Dari Rekening	: 752077455
Ke Institusi	: PENERIMAAN NEGARA
Nomor Tagihan	: 820220527886829
Jumlah Tagihan	: IDR 99,670,800.00
Status	: Berhasil

Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda.

Terima kasih.

PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk

Pemberitahuan ini dicetak secara komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat Bank
==========
==========

// EnglishDear UP2M TSL FTUI UKK

Thank you for using BNIDirect.
We would like to inform You the following transaction that You have done in BNIDirect

{

Date/Time	: 27-May-2022 13:39:48
Reference No.	: 20220527110753279496
Transaction Type	: Bill Payment
From Account	: 752077455
To Institution	: PENERIMAAN NEGARA
Bill Number	: 820220527886829
Total Bill Amount	: IDR 99,670,800.00
Status	: Success

We hope this information will be useful to You

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA

KONFIRMASI PENERIMAAN

Billing Code : 820220527886829 Data Setoran : 1. Setoran Awal Tanggal : 27-05-2022 s.d. 31-05-2022

No.	NTPN BillingCode NTPNRS	NTB	Tanggal Penerimaan	Tanggal Buku	Nama	Bagan Akun SPAN	Mata uang	Nilai	Nilai Ekuivalen
1	73D3B8N3E122SGFD 820220527886829 (null)	000000670292	27-MAY-22	30-MAY-22	PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	634171.133.425912.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	99,670,800.00	0

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 31-05-22 08:57:50 oleh : 634171

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220531230982
Tanggal Billing	:	31-05-2022 08:36:58
Tanggal Kedaluwarsa	:	07-06-2022 08:36:58
Tanggal Bayar	:	-
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	-
Channel Bayar	:	-
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Puslitbang Transportasi Antarmoda
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja	:	***634171*** - PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA
Total Disetor	:	185.000.000 (IDR)
Terbilang	:	*Seratus Delapan Puluh Lima Juta (IDR)*
Status	:	Belum Dibayar
NTB	:	-
NTPN	:	-

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	185.000.000 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Belanja Barang Puslitbang TRansportasi Antarmoda T.A.2021 (Studi Swakelola Tipe 2)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website https://penerimaan-negara.info dan http://bit.ly/infobayarMPNG2.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

---oOOo---

Tanggal Cetak : 31/05/2022 08:37:01 WIB ***1/2*** ***SIMPONI***

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian Keuangan

BNI

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 31/05/22 09:58:16
Tanggal Buku : 31/05/22
Kode Cabang Bank : 94
KCU MENTENG

NTB : 000000568133
NTPN : 0B3AF2G4V71F7I86
STAN : 021266

Data Setoran :
Kode Billing : 820220531230982
Nama Wajib Bayar : PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA
Kementerian / Lembaga : 022
Unit Eselon I : 11
Satuan Kerja : 634171
Jumlah Setoran : 185.000.000,00
Mata Uang : IDR
Terbilang : seratus delapan puluh lima juta rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
BNI
KANTOR CAPEM
Jl. Letjen R.M. GAMBIR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA

KONFIRMASI PENERIMAAN

Billing Code : 820220531230982 Data Setoran : 1. Setoran Awal Tanggal : 31-05-2022 s.d. 02-06-2022

No.	NTPN BillingCode NTPNRS	NTB	Tanggal Penerimaan	Tanggal Buku	Nama	Bagan Akun SPAN	Mata uang	Nilai	Nilai Ekuivalen
1	0B3AF2G4V71F7I86 820220531230982 (null)	000000568133	31-MAY-22	31-MAY-22	PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	634171.133.425912.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	185,000,000.00	0

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820221226928211
Tanggal Billing	:	26-12-2022 09:00:26
Tanggal Kedaluwarsa	:	02-01-2023 09:00:26
Tanggal Bayar	:	26-12-2022 09:07:02
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***11*** - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	:	***634171*** - PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
Total Disetor	:	12.385.000 (IDR)
Terbilang	:	*Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000731243**
NTPN	:	**091D11JNFD3Q9I2J**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	12.385.000 (IDR)
Keterangan	:	HBL RL-720/25/2022 20.12.22